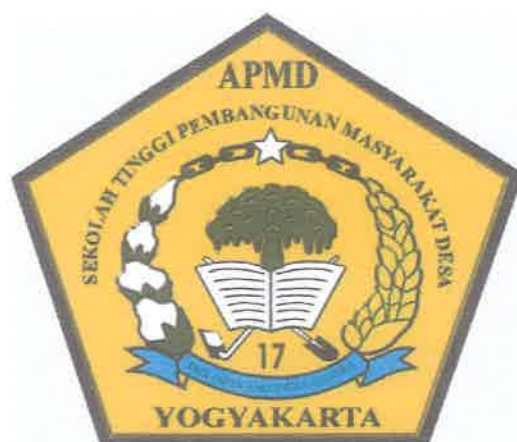


SKRIPSI

***COLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN
DESA WISATA GOA SELARONG DI KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



OLEH:

ELTON JOHN NEMBAFU

18520115

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL

***COLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN DESA**

WISATA GOA SELARONG DI KALURAHAN GUWOSARI

KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana ~~Jenjang~~ Pendidikan Strata
Satu (S1)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juli 2025
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Ketua Penguji/Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si
Penguji Sampung I

Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat
Penguji Sampung II

TANDA TANGAN



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elton John Nembafu

Nim : 18520115

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Colaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Juli 2025



Elton John Nembafu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Elton John Nembafu

NIM : 18520115

Telp : 081225307620

Email : eltonnimbafu@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Colaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 14 Juli 2025
buat pernyataan

Elton John Nembafu
18520115

HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melindungi, menyertai dan memberikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini.
2. Teristimewa Kepada pahlawan, cinta pertama penulis, referensi hidup terbaik selama penulis hidup hingga saat ini yakni, Bapak. Klemens Nembafu, SE dan Ibu. Margaretha Tutuop, S,Ag (Alm) yang senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Keduanya merupakan merupakan sosok orang tua yang membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Penulis sadar, bahwa setiap kata dalam Skripsi ini adalah buah dari kerja keras yang disertai doa dari kedua orang tuaku. Skripsi ini adalah persembahan dari anak kalian yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa. Terima kasih atas nasehat dan kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah kaki penulis. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan apa yang sudah bapak ibu berikan buat penulis.
3. Kepada Kaka. Martinus Nembafu, Adik. Christoforus Nembafu dan Reinaldi Nembafu yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
4. Kepada Om. Andreas Tutuop beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
5. Kepada Mama Tua. Chaterina Adopak beserta keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

6. Kepada Norika Enggelina Barry yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih
7. Saudara-saudari seangkatan Ilmu Pemerintahan 2018 terlebih khususnya IP3B yang telah mewarnai masa perkuliahan dan ikut serta menanyakan progres dan juga ikut memotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
8. Saudara-saudara Squad Tongkrongan Subuh (Sultan Alor, Boming, Umbu, Anugra, Ade.Silas, dan Ade.Lukas) yang telah memberikan semangat, dukungan, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
9. Keluarga Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (FOKMAPA) STPMD “APMD” Yogyakarta, Keluarga Barisan Mahasiswa Kaimana (BAMANA) Kota Study Yogyakarta, Keluarga Penghuni Kost Bapa Koe yang sudah menjadi wadah dalam berbagi susah dan senang, penulis mengucapkan terima kasih

Dan saudara-saudari maupun keluarga-keluarga semua yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, penulis tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan dari saudara-saudari maupun keluarga-keluarga semuanya, kiranya Tuhan Yang Maha Esa lah yang membalas kebaikan-kebaikan dari saudara-saudari maupun keluarga-keluarga semuanya. Terima Kasih

MOTTO

Pertolonganku ialah Dari Tuhan Yang Menciptakan Langit dan Bumi”
(Mazmur 121:2)

“TUHAN Akan Menjaga Keluar Masukmu,
Dari Sekarang Sampai Selama-lamanya”
(Mazmur 121: 8)

"Tetaplah berusaha, karena setiap langkah kecil
membawa kita lebih dekat pada tujuan besar"
(Elton John Nembafu)

“Skripsi ini bukan Akhir dari Tongkrongan kita tetapi
sebagai Awal yang baik untuk Kekeluargaan Kita”
(Squad Tongkrongan Subuh)

“Kerjakan Bagian Kita, Selebihnya Serahkan Kepada TUHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunianya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “*Colaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, di kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis, khususnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.S.i sebagai dosen pembimbing yang sudah berbesar hati menerima saya sebagai anak bimbingan, serta senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian Skripsi sebagai tugas akhir.
5. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si sebagai penguji 1

6. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat sebagai penguji 2
7. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
8. Seluruh staf pegawai Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta atas segala pelayanan yang telah diberikan selama ini guna untuk menunjang kegiatan perkuliahan.
9. Pemerintah Dinas Pariwisata Bantul, Pemerintah Kalurahan Guwosari, Pengelola Desa Wisata Goa Selarong serta Masyarakat Padukuhan Kembangputihan sebagai tempat penelitian, dan juga ikut membantu penulis untuk memberikan informasi dan data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan selalu terbuka dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, sehingga akan menjadi pelajaran bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
F. <i>Literatur Review</i>	5
G. Kerangka Konseptual	13
1. <i>Colaborative Governance</i>	13
2. Pengembangan Desa Wisata	18
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Unit Analisis Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Analisis Data	32
BAB II PROFIL KALURAHAN DAN DESA WISATA GOA SELARONG.....	34
A. Sejarah Kalurahan Guwosari.....	34
B. Kondisi Geografis	37

C. Kondisi Demografis	39
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	40
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
D. Kondisi Sarana dan Prasarana	46
1. Sarana dan Prasarana Pendidikan	46
2. Sarana dan Prasarana Kesehatan	47
3. Sarana dan Prasarana Ibadah	48
E. Kondisi Pemerintahan	49
1. Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari	49
2. Visi dan Misi Kalurahan Guwosari	52
F. Sejarah Goa Selarong	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Kerjasama antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	60
B. Konsensus Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	74
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata	84
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
PEDOMAN WAWANCARA	99
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian	26
Tabel 2. 1 Daftar Lurah Kalurahan Guwosari	36
Tabel 2. 2 Nama Perangkat Kalurahan Guwosari	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Guwosari	37
Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	40
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	44
Gambar 2. 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	46
Gambar 2. 7 Sarana dan Prasarana Kesehatan	47
Gambar 2. 8 Sarana dan Prasarana Ibadah.....	48
Gambar 2. 9 Bagan Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari	50
Gambar 2. 10 Goa Selarong Kakung	56
Gambar 2. 11 Goa Selarong Putri	57

INTISARI

Pengembangan desa wisata menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan memperkuat identitas lokal. Goa Selarong, yang terletak di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, memiliki potensi sejarah, budaya, dan alam yang besar. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan lemahnya kolaborasi antar aktor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip *Collaborative Governance* diterapkan dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah kalurahan, Dinas Pariwisata Bantul, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan pengelola wisata. Penelitian difokuskan pada tiga aspek utama: kerjasama antar aktor, pencapaian konsensus, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awalnya, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat berjalan cukup efektif dan partisipatif. Namun, setelah pengelolaan dialihkan ke Dinas Pariwisata Bantul, semangat kolaborasi menurun karena pendekatan yang lebih birokratis dan top-down. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan kolaboratif yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal, guna menjaga keberlanjutan dan keberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Desa Wisata, Goa Selarong, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Pariwisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sebagai sektor yang bersifat multiplikatif, pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB), tetapi juga membuka peluang lapangan kerja, mempromosikan budaya lokal, serta mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pengembangan desa wisata menjadi salah satu upaya yang efektif untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indonesia, dengan keanekaragaman budaya, alam, dan tradisinya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan desa wisata. Keberadaan desa wisata diharapkan dapat menjadi solusi bagi daerah pedesaan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti keindahan alam, seni budaya, serta produk kerajinan. Namun, pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alamiah atau budaya, melainkan juga pada sinergi antaraktor yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi. Dalam hal ini, konsep *Collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) menjadi pendekatan yang relevan untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.

Tata kelola kolaboratif merupakan sebuah mekanisme kerja sama yang menekankan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks desa wisata, tata kelola kolaboratif bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aktor-aktor tersebut, sekaligus memaksimalkan potensi desa secara efektif. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan, pelaku usaha sebagai mitra strategis, dan akademisi sebagai pemberi rekomendasi berbasis penelitian. Pendekatan ini mampu mengurangi potensi konflik kepentingan dan memperkuat kolaborasi menuju pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Desa Wisata Goa Selarong, yang terletak di Desa Kembangputihan, Guvosari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Desa ini dikenal karena daya tarik wisata alam berupa Goa Selarong, yang memiliki nilai sejarah dan religi. Wisata Goa Selarong merupakan wisata yang memberikan kesan sejarah kemudian dijadikan wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, kemudian Peraturan Bupati (Perbub) Bantul Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga. Retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah mewujudkan kesejahteraan di Daerah.

Dengan demikian, tujuan utama dalam Perda dan Perbu Bantul tersebut adalah untuk mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan pembelanjaan wisatawan, kemudian meningkatkan produk domestik sebagai pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan berbasis mitigasi bencana. Selain itu, potensi seni budaya, produk lokal, dan keunikan tradisi masyarakatnya menjadi daya tarik tambahan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, potensi besar ini memerlukan strategi tata kelola yang baik untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam realitasnya, Desa Wisata Goa Selarong masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, dan belum optimalnya sinergi antaraktor. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, masyarakat setempat, pengelola wisata, serta dukungan akademisi, pengembangan Desa Wisata Goa Selarong diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat desa. Dengan demikian menjadi urgen untuk meneliti *Collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong, di Padukuhan Kembang Putih, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa pada Desa Wisata Goa Selorang, Kembangputihan, Guwosari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penekanan pada aspek-aspek berikut:

1. Dinamika kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata
2. Tindakan kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Wisata

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan penerapan *Collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong, Kembangputihan, Guwosari, Pajangan, Bantul. DIY

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan terkait *Collaborative governance* khususnya dalam konteks pengembangan desa wisata, serta memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Memberikan wawasan tentang pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program pembangunan desa.
- b. Bagi Masyarakat Desa: Memberikan pemahaman tentang bagaimana partisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
- c. Bagi Peneliti: Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan *Collaborative governance* dalam konteks pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat desa.

F. Literatur Review

1. Pada Jurnal: *Politic and Government Studies*, Vol. 3 No. 11 Tahun 2024, oleh Erica Indah Maulia, B. S. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran: Analisis Dampak Digitalisasi Desa Wisata”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelima proses kolaborasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga

proses kolaborasi yang terjalin memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat. Keberhasilan ini dicapai melalui kontribusi dan peran baik dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta dan lembaga lainnya dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. Namun kerberjalanan kolaborasi masih mendapatkan tantangan dan hambatan yaitu sulitnya menyelaraskan visi dari stakeholder yang kadang tidak mendukung konservasi lingkungan di Nglanggeran, belum meratanya distribusi manfaat, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan adanya regenerasi kepengurusan. Analisis kedua terkait digitalisasi di Desa Wisata Nglanggeran, digitalisasi menjadi faktor penunjang keberhasilan Desa Wisata Nglanggeran dalam hal promosi dan pelayanan kepada wisatawan. Digitalisasi Desa Wisata Nglanggeran telah dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial (Facebook, Twitter/X, Instagram, Tiktok), website, dan blog. hasil penelitian menunjukan digitalisasi memiliki dampak positif terutama dalam empat (4) aspek yaitu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat dari adanya kunjungan wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisata, dan peningkatan pemasaran destinasi wisata di Nglanggeran (Erica Indah Maulia et al., 2023).

2. Pada Jurnal: *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2021, oleh Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo)”. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa Hasil penelitian Wisata Kebun Teh Nglinggo Kabupaten Kulon Progo salah satu sumber pendapatan untuk masyarakat lokal dengan tingkat wisatawan berkunjung ke periwisata hingga juga meningkatkan pendapatan Masyarakat (Surya et al., 2021).

3. Pada Jurnal: Socio Politik, Vol. 1 No. 5 Tahun 2024, oleh Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, I Putu Dharmanu Yudartha, I. D. A. P. W yang berjudul “*Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan telah menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan akses informasi dan sumber daya bagi masyarakat lokal, serta perlunya penguatan mekanisme pengambilan keputusan dan monitoring. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperkuat *Collaborative governance* dalam mendukung pengembangan berkelanjutan Desa Wisata Kamasan (Kadek Bagus Rama Iswara Milandika et al..., 2024).
4. Pada Jurnal: *Social and Policy Issues* Vol. 3 No. 3 Tahun 2023 oleh Moreta, A., & Harirah MS, Z. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena tidak semua orang memahami bahwa daerahnya adalah tujuan wisata. Meskipun demikian, pihak lain yang terlibat telah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik yang berdampak pada

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan beberapa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat tertentu. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan ketersediaan homestay yang saat ini masih terbatas dan mengingat mayoritas pendapatan pariwisata berasal dari tamu yang menginap. Ini adalah adaptasi sementara yang nantinya akan digunakan sebagai koreksi untuk kolaborasi selanjutnya (Moreta & Harirah MS, 2023).

5. Pada Jurnal: Ilmu Sosial Dan Politik Vol. 4 No. 2 Tahun 2019, oleh Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, A. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan sudah cukup baik dalam mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Tahapan-tahapan dalam proses *Collaborative governance* (1) *face to face* dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan pemerintah, masyarakat dan pengelola dengan melakukan pertemuan secara langsung dalam bentuk forum musyawarah. (2) *Trust building* atau membangun kepercayaan dengan adanya sebuah pelatihan pengembangan SDM dan menyediakan tempat sampah di lokasi wisata. (3) *Commitment to process* atau komitmen terhadap proses kolaborasi dalam mengembangkan wisata edukasi telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam proses pengembangannya (4) *share Understanding* untuk menilai sejauh mana proses kolaborasi yang dihasilkan dalam mengembangkan wisata edukasi yaitu terdapat

forum pembinaan untuk pengelola, penyediaan kontrol atau pamong wisata untuk membantu dalam pengamanan wisata edukasi dan pengadaan promosi objek wisata (Dwi Alamsyah et al..., 2019).

6. Pada Jurnal: Public Policy and Management Review Vol. 13 No. 4 Tahun 2024, oleh Hana Imtiyaza, Retno Sunu Astuti, K. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi Di Kabupaten Brebes”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama sudah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal (Hana Imtiyaza et al., 2024).
7. Pada Jurnal: Neraca Manajemen, Ekonomi Vol. 3 No. 11 Tahun 2024 oleh Kinanggi, A. R. dengan judul Penelitian “*Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Edelweis Wonokitri Kabupaten Pasuruan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) *Network Struktur*, Keterlibatan stakeholders dalam kolaborasi sesuai dengan tupoksi dan peran masing-masing. Kerja sama yang dicapai hanya sebatas kesepakatan, tidak ada batasan atau kesamaan struktur organisasi, struktur organisasi hanya untuk masing-masing instansi. (2) *Trust Building*, Kepercayaan antar actor sudah cukup berjalan dengan baik, hal tersebut didasarkan dengan konsistensi masing-masing actor menjalankan peranannya dalam mengembangkan dan mengelola Desa Wisata Wonokitri. (3) *Commitment to process*, Semua aktor kolaborasi berkomitmen untuk mengembangkan Desa Wisata Wonokirti melalui

budidaya bunga edelweiss. Setiap stakeholders memiliki peran masing-masing yang dijalankan dalam kolaborasi tersebut. dengan komitmen yang telah disepakati bersama mengharuskan para actor tersebut melakukan kerjasama dan menjalankan peranannya. (4) *Information Sharing*, berbagi informasi antar stakeholders dalam tata kolaborasi pengembangan Desa Wisata Wonokitri telah berjalan dengan baik, tiap stakeholders rutin dan berkelanjutan melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya dan ada pertemuan rutin juga yang melibatkan keseluruhan stakeholder guna membahas kendala dan masalah dalam pengelolaan Desa Wisata. (5) *Access to Resource*, belum semua *stakeholders* dapat mengakses sumber daya yang telah ada. Seperti kelompok tani Hulun yang, masih kesulitan modal dalam budidaya bunga edelweiss. Adapun Faktor penghambat dalam kolaborasi tersebut adalah motivasi dari kelompok tani pembudidaya Bunga Edelweis masih rendah, rendahnya motivasi tersebut salah satunya adalah keterbatasan akses permodala (Kinanggi, 2024).

8. H Pada Jurnal: *Business and Investment Review* Vol. 2 No. 1 Tahun 2024, oleh Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriyanti. Dengan judul penelitian “*Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa permasalahan seperti adanya dominasi dari pihak masyarakat, masih terdapat kolaborasi tanpa

dokumen kerja sama tertulis, dan sumber daya keuangan dan SDM yang belum memadai. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah lebih rutin melakukan pengamatan langsung, swasta lebih intens melakukan promosi, pengelola meningkatkan kapasitas pelayanan wisata, memperluas jaringan kolaborasi, membuat aturan yang mengikat antar stakeholder dan masyarakat lebih semangat berkontribusi dalam pengembangan desa wisata (Ni Made Angeliana Suwantara Putri et al., 2024).

9. Pada Jurnal: Penelitian Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, oleh Didiek Dwiyanto, A. S. dengan judul penelitian “Pengembangan Desa Wisata Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam Perspektif *Collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan Desa Wisata Gununganyar sudah terjadi proses *collaborative governance* yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar *stakeholders* yang saling mendukung namun belum sepenuhnya berhasil karena kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanyalah akses terhadap otoritas dan kepercayaan diantara para *stakeholders* (Didiek Dwiyanto et al., 2022)
10. Pada Jurnal: Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol.1 No. 3 Tahun 2024 oleh Nurdiansyah Dino Alfian, I. W. dengan judul penelitian “*Collaborative governance* Pengembangan Pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *Collaborative governance* dapat membentuk dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak terkait pengembangan

pariwisata desa. Dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* pengembangan pariwisata di Desa Sidomulyo menimbulkan dampak sosial dan ekonomi meskipun pengembangannya kurang maksimal karena terdapat beberapa kendala yang terjadi (Nurdiansyah Dino Alfian, 2024).

Novelty dari penelitian berjudul *Collaborative governance dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapenewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*" terletak pada penerapan model tata kelola kolaboratif dalam konteks pengembangan desa wisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam suatu daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Berbeda dengan penelitian lain yang sering kali hanya menyoroti peran pemerintah atau masyarakat dalam pengelolaan wisata, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana kolaborasi multilevel antara pemerintah kabupaten, kalurahan, dan masyarakat lokal dapat menghasilkan pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan perspektif baru mengenai keberlanjutan sosial dan ekonomi dalam pengembangan desa wisata, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat lokal serta dampak sosial jangka panjang. Melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih komprehensif tentang efektivitas *Collaborative governance* dalam konteks pengembangan

pariwisata berbasis masyarakat di Yogyakarta, yang dapat menjadi model bagi pengembangan desa wisata di daerah lain di Indonesia

G. Kerangka Konseptual

1.1. Pengertian *Collaborative Governance*

1.2.1. *Collaborative Governance*

Collaborative governance muncul seiring dengan berkembangnya paradigma governance, di mana masyarakat semakin kompleks, dan pemerintah menghadapi masalah yang lebih rumit. Selain itu, pemerintah juga terbatas oleh waktu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga membutuhkan kolaborasi dengan aktor eksternal (Charala, 2012: 264).

Menurut Holzer (2019) *Collaborative governance* adalah kondisi di mana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan Masyarakat, (Hanny Rizky Wasiat & Valiant Salomo, 2024)

Ansell dan Gash (2017) menyatakan bahwa *Collaborative governance* merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam forum bersama untuk mencapai konsensus. Mereka mendefinisikan *Collaborative governance* sebagai sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan

konsultatif, dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik.

Definisi Ansell dan Gash (2007: 5) menekankan enam kriteria penting. Pertama, forum ini diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekadar berkonsultasi dengan pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan memiliki pertemuan rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus. Keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007: 544).

Collaborative governance adalah instrumen yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Instrumen ini tepat untuk mengatasi masalah, karena *Collaborative governance* menciptakan "kepemilikan bersama" terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif berbeda mengenai suatu permasalahan, dan menciptakan pemahaman bersama di antara mereka bukanlah hal yang mudah. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan pemahaman yang sama terhadap masalah tersebut (Ansell dan Ansell, 2017: 172).

Collaborative governance adalah forum yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011: 4), *Collaborative governance* adalah kondisi di mana pemerintah

mencapai tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu.

Collaborative governance juga mencerminkan ketergantungan saling bergantung antara aktor-aktor yang terlibat. Keinginan untuk melakukan *Collaborative governance* muncul karena para aktor menyadari keterbatasan yang mereka miliki. Aktor tersebut kemudian menyatakan keinginan dan kesediaan untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Setiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi perlu dibangun (Ansell, 2021: 178).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative governance* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) yang menghasilkan kesepakatan bersama, keputusan bersama, dan pencapaian konsensus melalui interaksi formal maupun informal dalam pembuatan dan pengembangan norma-norma interaksi yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, dalam kolaborasi ini, interaksi yang terjadi bersifat egaliter, di mana seluruh aktor memiliki kedudukan yang sama.

1.2.2. Hubungan *Caloborative Governance*

Ansell dan Gash membagi proses hubungan dalam kolaborasi menjadi beberapa tahapan, yaitu pertemuan tatap muka, komitmen

terhadap proses, membangun kepercayaan, berbagi pemahaman, dan hasil sementara.

1) Pertemuan Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Pertemuan tatap muka atau face to face dialogue adalah pertemuan langsung antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan waktu yang sama, yang memungkinkan terjadinya dialog interaktif untuk membahas kepentingan bersama. Proses ini sangat penting sebagai langkah awal dalam sebuah *Collaborative governance*; tanpa adanya pertemuan tatap muka, kolaborasi tersebut tidak akan berjalan.

2) Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan oleh semua pihak. Komitmen ini menunjukkan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi bersama. Proses ini harus dianggap sebagai milik bersama dan harus terbuka untuk memperoleh manfaat bersama.

3) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan adalah proses untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki niat yang sama dalam mengambil kebijakan terbaik untuk semua pihak. Proses ini dimulai dengan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam pengelolaan kolaborasi

seperti desa wisata. Para aktor kolaborasi harus dapat dipercaya dan kredibel dalam menjalankan kepentingan bersama, serta menyadari adanya ketergantungan antar aktor yang akan memperkuat kolaborasi jangka panjang.

4) Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Berbagi pemahaman adalah proses saling berbagi pengertian bahwa misi dari forum ini adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus memahami masalah yang ada dan memiliki pandangan yang sama tentang nilai-nilai dasar yang menjadi landasan proses tersebut. Berbagi pemahaman juga dapat mencakup kesepakatan mengenai tujuan, visi, objektivitas, dan ideologi bersama. Hal ini akan berimplikasi pada kesepakatan untuk mengartikan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang sama.

5) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara adalah pencapaian dari proses yang sedang berlangsung yang memberikan nilai manfaat strategis dan relevansi. Kelima proses tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari proses tersebut tidak ada atau tidak dilaksanakan, maka model *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dapat dianggap tidak berhasil.

1.2.3. Proses Collaborative Governance

Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata memiliki tiga proses yaitu meliputi, (Saputra, dkk,2023).

1) Dinamika Kolaborasi

Pada aspek ini merupakan penggerak penting didalam proses kolaborasi dan memiliki sifat yang beubah-ubah. Kolaborasi yang baik terdapat dinamika dan didalam dinamika kolaborasi akan berfokus pada motivasi dan prinsip bersama untuk pengelolaan/pengembangan pariwisata di kabupaten polewali mandar.

2) Tindakan Kolaborasi

Pada aspek ini adalah tindakan-tindakan kalaborasi merupakan tindakan yang dilakukan dalam proses kolaborasi seperti tindakan memfasilitasi kegiatan lapangan dan memajukan proses kolaborasi guna membantu dalam pengelolaan pariwisata.

1.2.Pengembangan Desa Wisata

2.2.1. Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata dapat dilihat dari berbagai perspektif yang memberikan gambaran tentang tujuan, manfaat, dan proses yang terlibat dalam upaya menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Beberapa ahli memberikan pandangan yang berbeda, tetapi pada intinya, mereka sepakat bahwa pengembangan desa wisata harus

melibatkan masyarakat setempat, memperhatikan aspek keberlanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Menurut Bramwell dan Sharman (1999), pengembangan desa wisata adalah sebuah proses yang bertujuan untuk merencanakan, mengelola, dan mempromosikan desa sebagai destinasi wisata yang menarik. Proses ini tidak hanya melibatkan peningkatan fasilitas dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di desa tersebut. Dalam pandangan mereka, pengembangan desa wisata harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta.

Sedangkan menurut Mason (2003), pengembangan desa wisata juga harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang memperhatikan kualitas hidup masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata tidak hanya akan memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat identitas budaya masyarakat desa dan memperkenalkan mereka pada peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam pandangannya, pengembangan desa wisata harus mengutamakan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat langsung dari sektor pariwisata. Wang (2012) menyatakan bahwa pengembangan desa wisata dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak desa di Indonesia yang memiliki kekayaan alam

dan budaya, namun belum terkelola dengan baik sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata menjadi penting, tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga sebagai cara untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Dalam hal ini, desa wisata dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk tetap tinggal di desa mereka sambil meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pariwisata.

2.2.2. Tujuan Pengembangan Desa Wisata

Secara umum, tujuan pengembangan desa wisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sektor pariwisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya lokal. Sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan, pengembangan desa wisata bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan akses terhadap pelayanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengembangan desa wisata juga bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada wisatawan, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas budaya masyarakat desa.

Menurut Sari (2018), pengembangan desa wisata diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, di mana masyarakat desa dapat memperoleh manfaat langsung dari sektor pariwisata. Salah satu tujuan penting lainnya adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada sektor pertanian

atau pekerjaan lain yang terbatas. Dengan adanya sektor pariwisata, masyarakat desa dapat memiliki berbagai peluang ekonomi baru, seperti membuka usaha homestay, restoran, dan menjual produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan tradisional, atau pakaian adat.

Selain itu, pengembangan desa wisata juga bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam dan budaya lokal. Banyak desa yang memiliki potensi alam yang luar biasa, namun sering kali tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan desa wisata yang berbasis pada keberlanjutan akan memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan bijaksana, tanpa merusak lingkungan. Hal ini akan menciptakan hubungan simbiosis antara masyarakat desa dan alam sekitarnya.

2.2.3. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata memerlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata. Inskeep (1991) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal adalah kunci utama dalam pengembangan desa wisata. Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek pengelolaan pariwisata, mulai dari manajemen homestay, pengelolaan sumber daya alam, hingga keterampilan dalam berinteraksi dengan

wisatawan. Pelatihan ini sangat penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pariwisata, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pengelolaannya.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur yang memadai juga sangat penting. Manning (2001) berpendapat bahwa infrastruktur merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan desa wisata. Infrastruktur yang dimaksud meliputi aksesibilitas, seperti jalan yang baik menuju desa, fasilitas publik seperti tempat parkir, toilet, serta akomodasi yang nyaman bagi wisatawan. Tanpa infrastruktur yang memadai, pengunjung akan kesulitan untuk mencapai lokasi desa wisata, dan pengalaman wisata mereka bisa terganggu.

Selain itu, pengembangan desa wisata juga harus didukung oleh pemasaran yang efektif. Holloway (2009) menekankan bahwa promosi yang baik dapat meningkatkan daya tarik desa wisata, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pemasaran melalui media sosial dan platform daring, seperti website dan aplikasi perjalanan, dapat membantu memperkenalkan desa wisata kepada audiens yang lebih luas. Selain itu, kerjasama dengan agen perjalanan dan tour operator juga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke desa.

2.2.4. Tantangan dalam Pengembangan Desa Wisata

Meskipun pengembangan desa wisata memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya

sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola sektor pariwisata. Banyak desa yang belum memiliki tenaga ahli dalam manajemen pariwisata, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Selain itu, pengembangan desa wisata harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Sumber daya alam yang dimiliki desa harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa kegiatan wisata tidak merusak ekosistem. Jika tidak dikelola dengan baik, pengembangan desa wisata bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi, kerusakan habitat, atau over-eksploitasi sumber daya alam.

Tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya. Pengembangan desa wisata yang berlebihan bisa menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya identitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar tradisi dan kearifan lokal tetap terjaga meskipun desa tersebut berkembang menjadi destinasi wisata.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengembangan desa wisata merupakan upaya strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat pedesaan. Melalui sektor pariwisata, desa dapat memanfaatkan kekayaan alam dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkenalkan kebudayaan lokal

kepada dunia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang matang, pelibatan masyarakat lokal, pengelolaan yang berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur dan promosi. Meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa dan negara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini untuk memahami secara mendalam dan komprehensif terhadap proses *Collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata dan proses eksplorasi yang bertujuan untuk memahami perilaku individu atau kelompok serta menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses ini dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian dan prosedur yang bersifat sementara, mengumpulkan data melalui pengaturan partisipan, melakukan analisis data secara induktif, serta menyusun data yang terfragmentasi menjadi tema-tema yang relevan, kemudian memberikan interpretasi makna terhadap data yang diperoleh (Creswell dalam Sugiyono, 2017).

2. Unit Analisis Data

a. Objek Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana *Colaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul DIY.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini disebut sebagai informan. Informan adalah individu yang memberikan informasi terkait kondisi dan situasi yang melatar belakangi penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tujuan tertentu, yang dalam hal ini berkaitan dengan relasi antara Pemerintah Dinas Pariwisata Bantul, Pemerintah Kalurahan Guwosari dan Pengelola Wisata Goa Selarong dalam upaya mengembangkan desa wisata di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dapat memberikan informasi relevan terkait masalah yang sedang diteliti dan mampu menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi dan latar penelitian (Sugiyono, 2018). Dengan demikian, informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian dan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai situasi yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. 1 Nama-nama Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Masduki Rahmad, S.IP	Lurah Guwosari
2	Nur Hidayat, SH	Carik Guwosari
3	Umarwanto	Ulu-Ulu Guwosari
4	Warih Ardia, RD, A.Md	Dinas Pariwisata Bantul Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
5	Karman, A.Md	Dinas Pariwisata Bantul sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata
6	Suradih	Tokoh Masyarakat
7	Jumino	Anggota Pokdarwis
8	Triyanto	Ketua Karang Taruna Kembangputihan
9	Ratih	Pelaku UMKM
10	Sumiati	Pelaku UMKM
11	Tuci	Tokoh Budaya

Sumber: informan penelitian 2025

- 1) Pemerintah Kalurahan Guwosari berjumlah 3 orang terdiri dari (Lurahh, Carik dan Ulu-ulu)
- 2) Dinas Pariwisata Bantul berjumlah 2 orang terdiri dari (Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, dan Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata)
- 3) Pengelola Wisata Goa Selarong 2 orang terdiri dari (Ketua dan Sekretaris Pengelola Obyek Wisata Goa Selarong)
- 4) Masyarakat sekitar Obyek Wisata Goa Selarong 5 orang (Masyarakat yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat

dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata Goa Selarong)

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data yang disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan dari penelitian. Teknik-teknik ini dipilih dengan mempertimbangkan relevansi, keakuratan, dan kemampuannya dalam mengungkap pola, hubungan, maupun makna yang terkandung dalam data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain;

a. Observasi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan indera dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Observasi ini berguna ketika informasi mengenai masalah yang diteliti masih terbatas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi dan mungkin

mendapatkan petunjuk untuk menemukan solusi dari masalah tersebut.

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi adalah proses di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu yang ada di lokasi penelitian. Observasi dalam penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pihak terkait, seperti pemerintah desa, masyarakat lokal, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, berinteraksi dan berkolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong. Proses pengambilan keputusan bersama serta mekanisme koordinasi yang diterapkan akan menjadi perhatian utama, untuk memahami dinamika kolaborasi yang terjadi. Selain itu, observasi akan mengkaji peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan desa wisata, termasuk peran pemerintah dalam regulasi, pemberdayaan masyarakat oleh masyarakat lokal, dan kontribusi pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki kendala untuk mengakses beberapa dokumen kesepakatan antara pihak pemerintah, LSM dan Masyarakat terhadap pengembangan desa wisata goa selarong. Peneliti sudah berupaya untuk membangun pendekatan, tetapi tentu saja tidak mendapatkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian.

Fokus observasi selanjutnya adalah dampak pengembangan desa wisata terhadap lingkungan dan infrastruktur akan menjadi bagian penting dari pengamatan ini, dengan fokus pada keberlanjutan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Melalui observasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat mempercepat pengembangan Desa Wisata Goa Selarong serta memastikan keberlanjutan dan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggabungkan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020: 290). Wawancara mendalam dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas tanpa mengikuti pedoman pertanyaan yang ketat. Sementara itu, wawancara terarah melibatkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada informan.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data dan informasi langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan

dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti untuk melakukan tanya jawab mendalam dengan pihak terkait (informan penelitian), sambil mengacu pada pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai acuan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, penting untuk memahami penerapan konsep *collaborative governance* atau kolaborasi pemerintahan dalam konteks pengembangan Desa Wisata Goa Selarong. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting, baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Setiap pihak memiliki kontribusi tersendiri dalam proses pengembangan desa wisata, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Proses kolaborasi ini memerlukan koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama, namun tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, seperti perbedaan kepentingan dan komunikasi yang efektif.

Selain itu, mekanisme yang digunakan dalam kolaborasi ini juga penting untuk memastikan komunikasi yang lancar dan pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur desa wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kolaborasi

yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas wisata dan daya tarik Goa Selarong sebagai destinasi wisata unggulan.

Untuk memastikan keberlanjutan pengembangan desa wisata, penting untuk mengevaluasi hasil kolaborasi ini dan menjaga agar kerja sama antar pihak tetap terjalin dengan baik. Evaluasi terhadap kolaborasi ini dapat memberikan gambaran sejauh mana pengembangan desa wisata dapat berlanjut, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil agar pengembangan pariwisata di Goa Selarong tetap berlangsung dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti otentik bagi peneliti yang diperoleh dengan menggunakan alat yang disiapkan atau seadanya untuk mengumpulkan data yang diperlukan secara cukup. Hasil dokumentasi tersebut kemudian diolah untuk melengkapi data yang diperoleh melalui metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang sudah dikumpulkan oleh peneliti mengacu pada fakta-fakta yang terdapat dalam profil Kalurahan Guwosari yakni kondisi geografis kalurahan, kondisi demografis kalurahan, dan kondisi sarana dan prasarana kalurahan. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini juga mengacu pada fakta-fakta yang terdapat dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata goa selarong

dan juga bukti dokumentasi bersama informan penelitian di lokasi penelitian pada saat wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses untuk memilih informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting, serta menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis.

Demikian dalam analisis data peneliti sudah melalui proses dengan melibatkan koordinasi data ke dalam kategori-kategori, merinci data ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola hubungan antar kategori, dan akhirnya menarik kesimpulan agar informasi tersebut dapat dengan mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

a. Pengumpulan Data

Peneliti telah melakukan pengumpulan data yang sudah dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses penelitian dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong. Data yang diperoleh kemudian dicatat dalam bentuk catatan, selanjutnya dideskripsikan dan direfleksikan (Sugiyono, 2019:323),

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019:323), reduksi data adalah proses untuk merangkum, memilah hal-hal yang penting, dan memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan topik

penelitian. Dalam proses ini, peneliti mencari tema dan pola yang ada untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas, serta mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil dari reduksi data yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik sebagai keseluruhan maupun sebagai bagian-bagian yang membentuk kesatuan dalam konteks penelitian (Sugiyono, 2018:249).

d. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2015:83), triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

BAB II

PROFIL KALURAHAN DAN DESA WISATA GOA SELARONG

A. Sejarah Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari dibentuk dari gabungan dua desa, yakni Selarong dan Iroyudan berdasarkan perintah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bulan Oktober 1947. Nama Guwosari dipilih sebagai jalan tengah agar bisa diterima seluruh masyarakat tanpa menghilangkan icon Wilayah yakni Gua Selarong atau Gua Secang. Nama Guwosari sendiri menjadi sebutan lain dari Kawasan atau Wilayah yang disebut Selarong karena sebutan Selarong pada masa Perang Jawa meliputi seluruh Desa Guwosari bahkan sampai desa-desa sekitarnya. Sejarah dan asal nama Desa Selarong sangat jelas karena termuat dalam ingatan Trah Demang Joyosentono, sebagai keturunan Pangeran Aryo Selarong yang namanya diabadikan menjadi nama Desa Selarong. Juga trah dari keturunan saudara tiri Pangeran Aryo Selarong, yakni Pangeran Bumidirjo. Sedangkan nama Iroyudan masih simpang siur. Menurut keyakinan masyarakat nama Iroyudan berasal dari nama Kyai Ageng Wiroyudo, Panglima Besar Sultan Hamengkubuwono I dan sekaligus Kakek dari Istri Permaisuri Sultan Hamengkubuwono I. Akan tetapi dalam peta kuno, peta Perang Jawa, nama Desa Iroyudan tidak tertulis, tampak menjadi bagian dari wilayah Selarong. Kemungkinan besar pada masa lalu sampai berakhirnya Perang Jawa, Desa Iroyudan merupakan bagian dari Desa Selarong. Nama Selarong berasal dari nama Pangeran Aryo Selarong, putra Prabu Hanyokrowati atau Pangeran Sedo Krapyak, raja kedua Kasultanan Mataram dari Istri Permaisuri I

(Kulon), Ratu Tulung Ayu. Belum diketahui pasti nama mudanya apakah RM. Wuryah ataukah RM. Chakra, karena keduanya memakai nama gelar yang sama yakni Pangeran Aryo Selarong. Namun dimungkinkan keduanya adalah orang yang sama. Sebagai putra dari permaisuri utama, Pangeran Aryo Selarong sebenarnya memiliki hak atas tahta, namun merelakan untuk adiknya, RM. Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo, bahkan berjuang mendukung demi kejayaan Kasultanan Mataram melalui jalur agama dan militer, di antaranya memimpin penaklukan Jember dan Pasuruan. Namun tatkala pemerintahan beralih ke raja selanjutnya, Amangkurat I, beliau bersikap menentang karena raja banyak melakukan tindak angkara dan sewenang wenang, 2 jauh dari agama. Beliau memutuskan meninggalkan kraton, tinggal di desa yang sekarang disebut Selarong untuk mendirikan pesantren. Beliau menjadi penguasa Selarong dan dilanjutkan anak keturunannya. Beliau wafat tahun 1669 dibunuh oleh prajurit sandi Prabu Amangkurat I di desa Bareng, Kuwel, Delanggu. Peristiwa tersebut tertulis dalam Babad Momana dan laporan Rijklof van Goens kepada Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, Joan Maetsuicker, dan tulisan Sejarawan Belanda Hermanus Johannes de Graaf. Untuk menghormati, desa tempat tinggal beliau kemudian disebut Selarong. Kekuasaan secara berturut-turut dipegang oleh anak keturunannya, yakni:

1. Panembahan Aryo Selarong II (Raden Mas Abdullah)
2. Panembahan Aryo Selarong III (Raden Mas Wongsokoro)
3. Kenthol Resoboyo
4. Kenthol Soboyo

5. Kenthol Wongsomenggolo
6. Kenthol Ongkojoyo
7. Raden Joyosentono (Demang)

Selanjutnya, pada tahun 1947 Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan perintah penggabungan desa-desa di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Oktober 1947 Desa Selarong bergabung dengan Desa Iroyudan dengan nama baru Guwosari dengan lurah pertama tahun 1946 -1961 yaitu Sukrowardi. Tahun 1961 jabatan lurah digantikan oleh Ngumar sampai tahun 1988. Tahun 1988 -1992 lurah dijabat oleh Budiman sebagai Pejabat Sementara. Tahun 1992 dilaksanakan pemilihan lurah untuk pertama kalinya dan terpilih sebagai lurah M. Daim Raharjo sampai tahun 1995. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sejarah kepemimpinan Desa Guwosari sebagai berikut:

Daftar Lurah Kalurahan Guwosari

Tabel 2. 1 Daftar Lurah Kalurahan Guwosari

No	Tahun Periode	Nama Lurah	Keterangan
1	1946-1961	Sukrowadi	Kembangputihan
2	1961-1989	Ngumar	Kembangputihan
3	1989-1992	Budiman	Pejabat Sementara
4	1992-1995	M.Daim Raharjo	Karangber
5	1995-1997	Zainuri	Pejabat Sementara
6	1997-2000	M.Zainuri	Iroyudan
7	2000-2002	Drs.Abani	Pejabat Sementara
8	2002-2012	Abdul Basyir,S.Ag	Santan
9	2012-2018	H.Muh.Suharto	Iroyudan
10	2018-2026	Masduki Rahmad,SIP	Pringgading

Sumber: Profil Kalurahan 2024

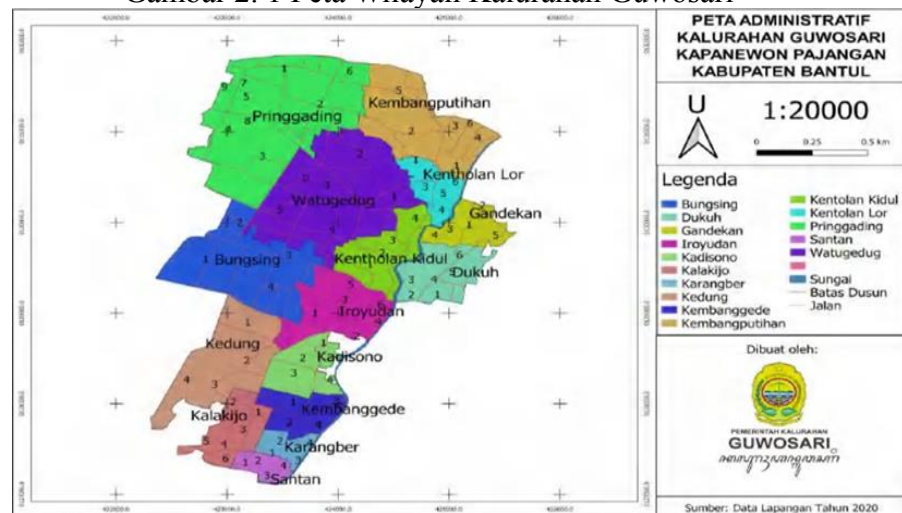
B. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kalurahan Guwosari saat ini di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan berdasarkan letak Geografis Wilayah Kalurahan. Kalurahan Guwosari terletak di Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul batas wilayah dan luas kalurahan Guwosari dengan posisi kemiringan 830.011 hektar, dengan batas kelurahan.

1. Peta Wilayah Kalurahan Guwosari

Kalurahan Guwosari memiliki luas wilayah 830,01 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 13.521 jiwa. Kalurahan Guwosari secara administratif terbagi dalam 15 padukuhan yaitu: Kembangputihan, Kentolan Lor, Kentolan Kidul, Gandekan, Dukuh, Iroyudan, Kadisono, Kembang Gede, Karangber, Santan, Kalikijo, Kedung, Bungsing, Watugedug, dan Pringgading

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Guwosari



Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024.

Berdasarkan gambar peta diatas,dapat kita lihat bahwa Kalurahan Guwosari memiliki cakupan wilayah yang cukup luas.Dimana setiap

wilayah di Guwosari memiliki potensi masing-masing yang ada di tiap Padukuhan yang mana jika dikelola dan dikembangkan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat Guwosari.

2. Batas Wilayah Kalurahan Guwosari

Secara administratif Kalurahan Guwosari terletak di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan beberapa desa yaitu:

1. Sebelah Utara: Kalurahan Bangunjiwo
2. Sebelah Selatan: Kalurahan Wijirejo
3. Sebelah Barat: Kalurahan Sendangsari

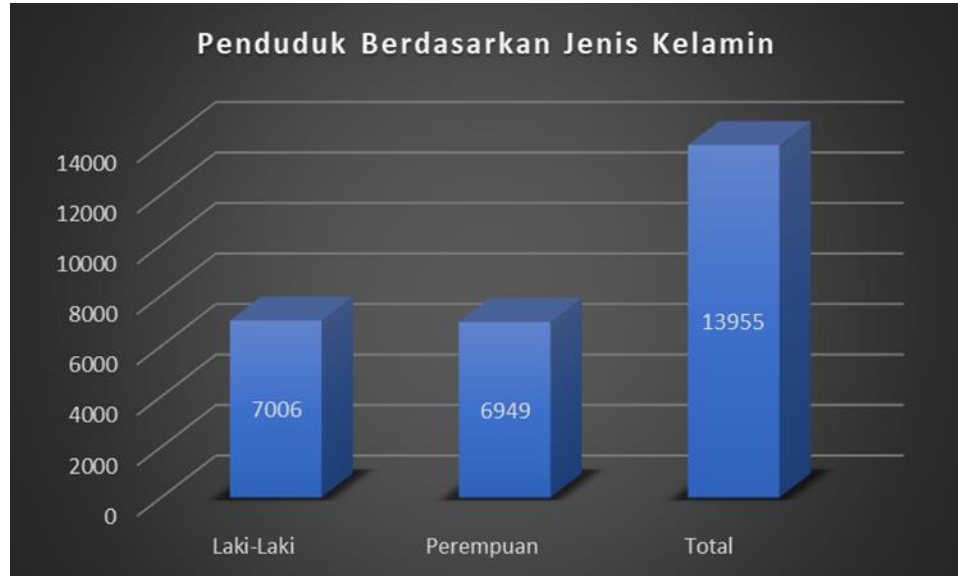
Sebelah Timur: Kalurahan Bantul dan Kalurahan Ringharjo
Selain itu, orbitas atau jarak Kalurahan Guwosari dengan pusat pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jarak dari Ibukota Kecamatan: 6,00 Km
2. Jarak dari Ibukota Kabupaten: 3,00 Km 59
3. Jarak dari Ibukota Provinsi: 15,00
4. Jumlah Tanah Bersertifikat di Kalurahan Guwosari: 113 Buah,
5. Luas Tanah Kas Kalurahan Guwosari : 367.812,00 Ha

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



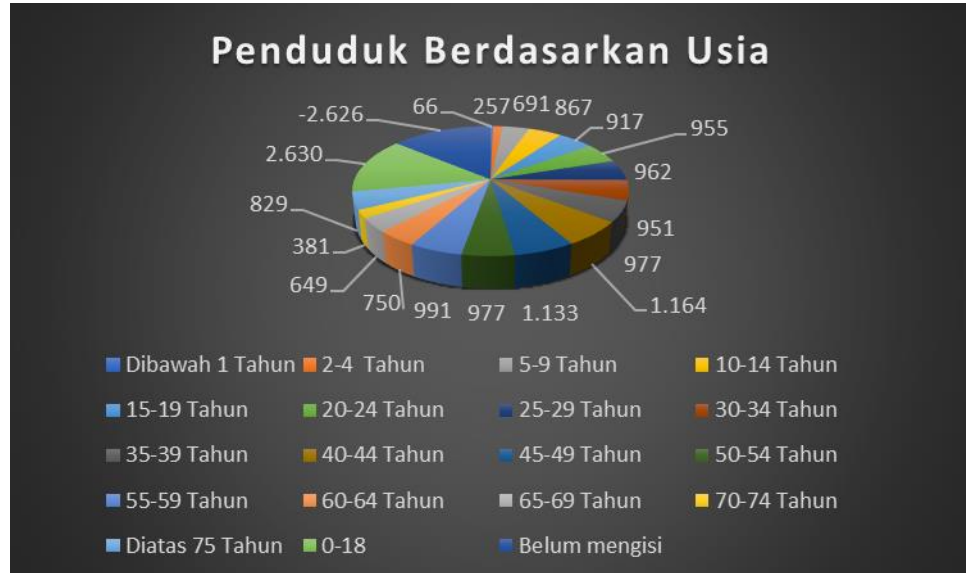
Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk di Kelurahan Guwosari terbagi antara laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang hampir seimbang. Total penduduk laki-laki di kelurahan ini tercatat sebanyak 7.006 orang, sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 6.949 orang. Meskipun terdapat sedikit selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, perbedaan ini menunjukkan komposisi demografis yang hampir merata antara kedua jenis kelamin.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, keberagaman dan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di Kelurahan Guwosari menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial, guna memastikan bahwa kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat dari kedua gender dapat terpenuhi secara adil dan merata.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia



Sumber Profil Kelurahan Guwosari 2024

Data distribusi penduduk di Kelurahan Guwosari berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur demografis wilayah tersebut. Penduduk Kelurahan Guwosari berjumlah total 13.955 orang, terdiri dari 7.006 laki-laki dan 6.949 perempuan. Berikut adalah rincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.

Pada kelompok usia di bawah 1 tahun, terdapat 63 orang, dengan 34 laki-laki (0,24%) dan 29 perempuan (0,21%). Kelompok usia 2-4 tahun tercatat 253 orang, terdiri dari 139 laki-laki (1,00%) dan 114 perempuan (0,82%). Di kelompok usia 5-9 tahun, terdapat 725 orang, dengan 373 laki-laki (2,67%) dan 352 perempuan (2,52%). Pada kelompok usia 10-14 tahun, jumlah penduduk mencapai 884 orang, terdiri dari 459 laki-laki (3,29%) dan 425 perempuan (3,05%).

Kelompok usia 15-19 tahun tercatat 942 orang, dengan 477 laki-laki (3,42%) dan 465 perempuan (3,33%). Pada kelompok usia 20-24 tahun, terdapat 973 orang, terdiri dari 492 laki-laki (3,53%) dan 481 perempuan (3,45%). Kelompok usia 25-29 tahun tercatat 1.002 orang, dengan 482 laki-laki (3,45%) dan 520 perempuan (3,73%). Kelompok usia 30-34 tahun mencatatkan 996 orang, terdiri dari 486 laki-laki (3,48%) dan 510 perempuan (3,65%).

Pada kelompok usia 35-39 tahun, tercatat 1.020 orang, dengan 471 laki-laki (3,38%) dan 549 perempuan (3,93%). Kelompok usia 40-44 tahun terdiri dari 1.201 orang, dengan 598 laki-laki (4,29%) dan 603 perempuan (4,32%). Kelompok usia 45-49 tahun mencatatkan 1.162 orang, dengan 627 laki-laki (4,49%) dan 535 perempuan (3,83%). Pada kelompok usia 50-54 tahun, tercatat 1.010 orang, dengan 522 laki-laki (3,74%) dan 488 perempuan (3,50%).

Kelompok usia 55-59 tahun tercatat 1.038 orang, terdiri dari 532 laki-laki (3,81%) dan 506 perempuan (3,63%). Kelompok usia 60-64 tahun mencatatkan 772 orang, dengan 399 laki-laki (2,86%) dan 373 perempuan (2,67%). Pada kelompok usia 65-69 tahun, terdapat 671 orang, dengan 342 laki-laki (2,45%) dan 329 perempuan (2,36%). Kelompok usia 70-74 tahun tercatat 401 orang, dengan 198 laki-laki (1,42%) dan 203 perempuan (1,45%). Kelompok usia di atas 75 tahun mencatatkan 839 orang, dengan 374 laki-laki (2,68%) dan 465 perempuan (3,33%).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di bawah usia 18 tahun mencapai 2.690 orang (19,28%), dengan 1.395 laki-laki (10,00%) dan 1.295 perempuan (9,28%), yang menunjukkan bahwa sekitar 19,28% penduduk Kelurahan Guwosari terdiri dari anak-anak dan remaja. Dalam hal distribusi jenis kelamin, jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 50,20% laki-laki dan 49,80% perempuan. Meskipun terdapat sedikit perbedaan, komposisi penduduk Kelurahan Guwosari menunjukkan keseimbangan yang cukup signifikan antara kedua jenis kelamin.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama



Sumber: Profil Kelurahan Guwosari 2024

Data mengenai agama penduduk di Kelurahan Guwosari memberikan gambaran tentang keragaman keyakinan yang dianut oleh masyarakat di wilayah tersebut. Dari total 13.955 penduduk, mayoritas besar memeluk agama Islam, dengan jumlah mencapai 13.301 orang atau 95,31% dari total penduduk. Penduduk laki-laki yang beragama

Islam tercatat sebanyak 6.677 orang (47,85%), sementara perempuan sebanyak 6.624 orang (47,47%).

Selain agama Islam, ada pula kelompok agama minoritas yang tercatat di Kelurahan Guwosari. Agama Kristen diikuti oleh 212 orang (1,52%), dengan 113 laki-laki (0,81%) dan 99 perempuan (0,71%). Agama Katolik tercatat sebanyak 331 orang (2,37%), dengan rincian 161 laki-laki (1,15%) dan 170 perempuan (1,22%).

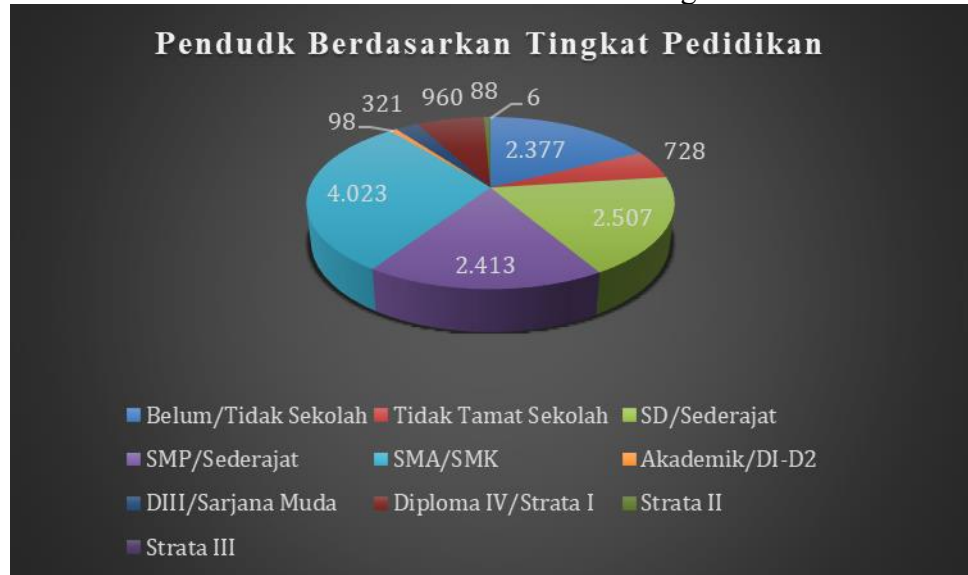
Kelompok agama lain yang lebih sedikit jumlahnya adalah Hindu, dengan 2 orang (0,01%), terdiri dari 1 laki-laki (0,01%) dan 1 perempuan (0,01%). Agama Buddha diikuti oleh 5 orang (0,04%), dengan 4 laki-laki (0,03%) dan 1 perempuan (0,01%). Kepercayaan Khonghucu dianut oleh 3 orang (0,02%), terdiri dari 1 laki-laki (0,01%) dan 2 perempuan (0,01%). Sementara itu, terdapat 1 orang (0,01%) yang mencatatkan dirinya sebagai penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan YME atau lainnya, yang terdiri dari 1 laki-laki (0,01%) dan tidak ada perempuan dalam kelompok ini.

Secara keseluruhan, 13.855 orang (99,28%) penduduk Kelurahan Guwosari sudah mencatatkan agama mereka, sementara 100 orang (0,72%) belum mengisi kolom agama, dengan 48 laki-laki (0,34%) dan 52 perempuan (0,37%) di antaranya. Dalam hal distribusi jenis kelamin berdasarkan agama, jumlah laki-laki yang menganut berbagai agama tercatat sebanyak 6.958 orang (50,20%), sementara jumlah perempuan adalah 6.949 orang (49,80%). Meski ada variasi dalam jumlah penganut agama tertentu, komposisi agama di Kelurahan

Guwosari tetap menunjukkan adanya keragaman yang cukup seimbang antara laki-laki dan Perempuan

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Profil Kelurahan Guwosari 2024

Data mengenai tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Guwosari menunjukkan beragamnya capaian pendidikan di kalangan masyarakat. Dari total 13.521 jiwa penduduk, terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat pendidikan yang tercatat. Sebanyak 2.377 orang (17,57%) belum atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal, sementara 728 orang (5,39%) tercatat memiliki pendidikan yang tidak tamat sekolah. Untuk tingkat pendidikan dasar, terdapat 2.507 orang (18,54%) yang memiliki pendidikan setingkat SD atau sederajat, dan 2.413 orang (17,85%) telah menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP atau sederajat.

Penduduk dengan pendidikan lebih tinggi menunjukkan angka yang lebih besar di tingkat SMA/SMK, dengan 4.023 orang (29,75%)

tercatat telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat tersebut. Sebanyak 98 orang (0,73%) memiliki pendidikan pada tingkat Akademik atau DI-D2, sementara 321 orang (2,37%) memiliki pendidikan setingkat Diploma III atau Sarjana Muda. Tercatat juga 960 orang (7,10%) dengan pendidikan pada tingkat Diploma IV atau Strata I, dan 88 orang (0,65%) telah menempuh pendidikan setingkat Strata II (Magister). Hanya 6 orang (0,04%) yang telah mencapai tingkat pendidikan Strata III (Doktoral).

Secara keseluruhan, meskipun mayoritas penduduk Kelurahan Guwosari telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/SMK, dengan jumlah 29,75%, namun terdapat potensi untuk peningkatan pendidikan lebih lanjut, terutama pada jenjang Strata II dan III yang relatif sedikit. Hal ini mencerminkan peluang untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

D. Kondisi Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Gambar 2. 6 Sarana dan Prasarana Pendidikan



Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024

Data mengenai sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Guwosari menunjukkan komitmen dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar bagi masyarakat. Terdapat total 35 unit sarana pendidikan di wilayah ini, yang terdiri dari berbagai jenis lembaga. Terdapat 12 unit PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang memberikan pembelajaran dasar untuk anak-anak usia dini, serta 10 unit Taman Kanak-Kanak (TK) yang menyediakan pendidikan bagi anak-anak sebelum memasuki sekolah dasar. Selain itu, ada 7 unit Sekolah Dasar (SD) yang memberikan pendidikan formal dasar kepada anak-anak usia sekolah. Untuk mendukung literasi, di Kelurahan Guwosari juga terdapat 1 unit perpustakaan desa yang menjadi sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat. Tak kalah penting,

terdapat 6 unit pesantren yang memberikan pendidikan agama serta pembinaan karakter dan spiritualitas.

Dengan adanya 35 unit sarana pendidikan ini, masyarakat Kelurahan Guwosari memiliki berbagai pilihan dalam mengakses pendidikan, baik formal maupun non-formal, yang dapat membantu dalam pengembangan wawasan dan keterampilan mereka

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Gambar 2. 7 Sarana dan Prasarana Kesehatan



Sumber: Profil Kelurahan Guwosari 2024

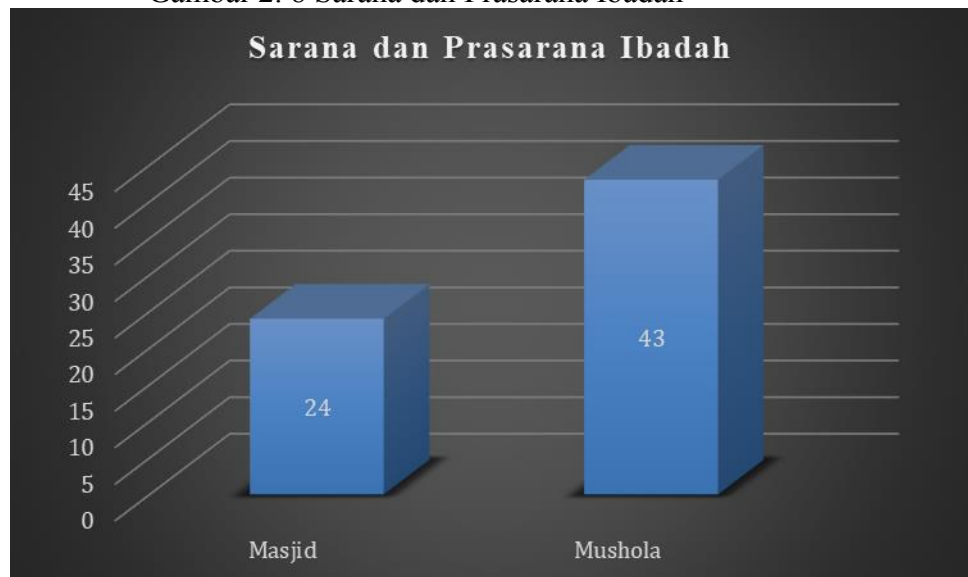
Data mengenai sarana dan prasarana kesehatan di Kelurahan Guwosari menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Terdapat total 21 unit sarana kesehatan yang tersebar di wilayah ini, yang terdiri dari beberapa jenis fasilitas. Terdapat 19 unit Posyandu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu hamil, balita, dan lansia, serta untuk melakukan imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, terdapat 1 unit Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan lebih

komprehensif kepada masyarakat, termasuk pengobatan, pemeriksaan kesehatan, serta pelayanan lainnya. Untuk layanan kesehatan spesialis, Kelurahan Guwosari juga memiliki 1 unit Poliklinik yang menyediakan layanan kesehatan dengan spesialisasi tertentu.

Dengan adanya 21 unit sarana dan prasarana kesehatan ini, masyarakat Kelurahan Guwosari memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

3. Sarana dan Prasarana Ibadah

Gambar 2. 8 Sarana dan Prasarana Ibadah



Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024

Data mengenai sarana dan prasarana ibadah di Kelurahan Guwosari mencerminkan komitmen masyarakat terhadap kegiatan keagamaan dan spiritual. Terdapat total 67 unit sarana ibadah yang tersebar di wilayah ini, yang terdiri dari 24 unit Masjid dan 43 unit Mushola. Masjid-masjid yang ada berfungsi sebagai tempat ibadah utama bagi umat Islam, sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial dan

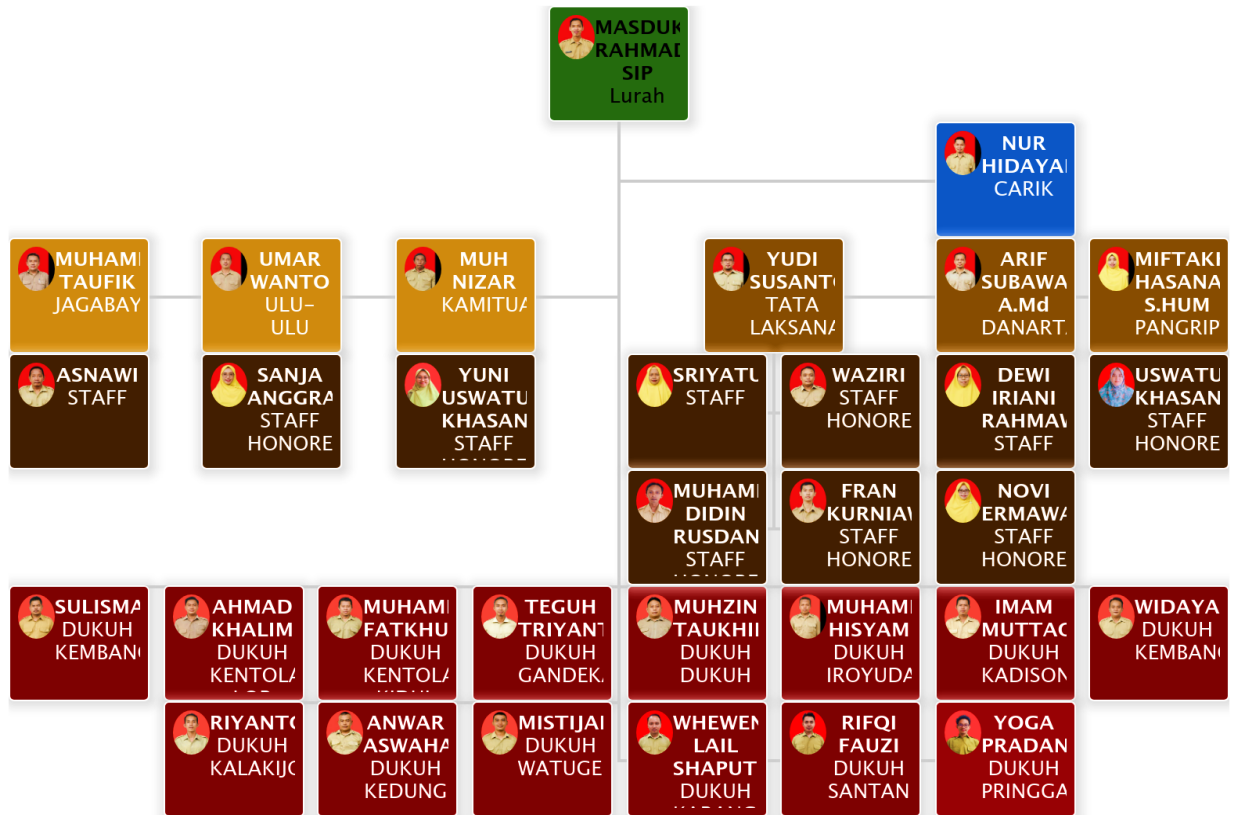
keagamaan lainnya, seperti pengajian, tadarus Al-Qur'an, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, mushola yang tersebar di berbagai sudut Kelurahan Guwosari juga menyediakan fasilitas ibadah bagi masyarakat, baik untuk sholat lima waktu maupun kegiatan keagamaan lainnya. Dengan keberadaan 67 unit sarana ibadah ini, masyarakat Kelurahan Guwosari memiliki akses yang cukup untuk menjalankan ibadah serta memperkuat ukhuwah dan kehidupan spiritual mereka.

E. Kondisi Pemerintahan

1. Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari

Pemerintah Kalurahan Guwosari dipimpin oleh Lurah yang dibantu oleh Carik serta beberapa lembaga Kalurahan. Dalam menjalankan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Panewu dan Dukuh, dengan bantuan Carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), serta lembaga-lembaga lainnya. Mereka bekerja sama untuk menjalankan roda pemerintahan dan memberdayakan masyarakat di tingkat Kalurahan. Berikut adalah susunan atau struktur pemerintahan Kalurahan Guwosari:

Gambar 2. 9 Bagan Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari
Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Guwosari



Highcharts.com

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024

Berdasarkan bagan Struktur Pemerintah Kalurahan Guwosari diatas, maka dapat diuraikan identitas perangkat kalurahan Guwosari sebagai berikut

Nama Perangkat Kalurahan Guwosari

Tabel 2. 2 Nama Perangkat Kalurahan Guwosari

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Masduki Rahmad, SIP	Laki-laki	Lurah	Diploma IV/Strata I
2	Nur Hidayad	Laki-laki	Carik	Diploma IV/Strata I
3	Muhammad Taufik	Laki-laki	Jagabaya	SLTA/ Sederajat
4	Umar Wanto	Laki-laki	Ulu-Ulu	SLTA/ Sederajat

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
5	Muh Nizar	Laki-laki	Kamitua	Akademi/Diploma III/S.Muda
6	Miftakhul Hasanah S.Hum	Perempuan	Pangripta	Diploma IV/Strata I
7	Arif Subawanto,A.Md	Laki-laki	Danarta	Akademi/Diploma III/S.Muda
8	Yudi Susanto	Laki-laki	Tata Laksana	Diploma IV/Strata 1
9	Jumari	Laki-laki	Staff	SLTA/Sederajat
10	Asnawi	Laki-laki	Staf	SLTA/Sederajat
11	Waziri	Laki-laki	Staf Honorer	Akademi/Diploma III/S.Muda
12	Sriyatun	Perempuan	Staf	SLTA/Sederajat
13	Muhammad Didin Rusdan	Laki-laki	Staf Honorer	SLTA/Sederajat
14	Sanja Anggraini	Perempuan	Staf Honorer	SLTA/Sederajat
15	Fran Kurniawan	Laki-laki	Staf Honorer	SLTA/Sederajat
16	Dewi Iriani Rahmawati	Perempuan	Staf	Diploma IV/Strata I
17	Novi Ermawati	Perempuan	Staf Honorer	Diploma IV/Strata I
18	Yuni Uswatun Khasanah	Perempuan	Staf Honorer	Diploma IV/Strata I
19	Uswatun Khasanah	Perempuan	Staf Honorer	Diploma IV/Strata I
20	Sulisman	Laki-laki	Dukuh Kembangputih	SLTA/Sederajat
21	Ahmad Khalim	Laki-laki	Dukuh Kentolan Lor	SLTA/Sederajat
22	Muhammad Fatkhurrohman	Laki-laki	Dukuh Kentolan Kidul	SLTA/Sederajat
23	Teguh Triyanto	Laki-laki	Dukuh Gandekan	SLTA/Sederajat
24	Muhzin Taukhid	Laki-laki	Dukuh Dukuh	SLTA/Sederajat

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir
25	Muhammad Hisyam	Laki-laki	Dukuh Iroyudan	SLTA/ Sederajat
26	Imam Muttaqin	Laki-laki	Dukuh Kadisono	SLTA/ Sederajat
27	Widayanto	Laki-laki	Dukuh Kembanggede	SLTA/ Sederajat
28	Whewen Lail Shaputra	Laki-laki	Dukuh Karangber	Diploma IV/Strata I
29	Rifqi Fauzi	Laki-laki	Dukuh Santan	SLTA/ Sederajat
30	Riyanto	Laki-laki	Dukuh Kalikijo	SLTA/ Sederajat
31	Anwar Aswahadi	Laki-laki	Dukuh Kedung	SLTA/ Sederajat
32	Ichwan	Laki-laki	Dukuh Bungsing	SLTA/ Sederajat
33	Mistijan	Laki-laki	Dukuh Watugedung	SLTA/ Sederajat
34	Yoga Pradana	Laki-laki	Dukuh Pringgading	Diploma IV/Strata I

Sumber: Profil Kalurahan Guwosari 2024

2. Visi dan Misi Kalurahan Guwosari

a. Visi

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kalurahan Guwosari bersama dengan perangkat desa tentunya mempunyai visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pemerintah Kalurahan Guwosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat Guwosari yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis asset dan potensi Kalurahan”.

b. Misi

Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam misi berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yang professional melalui tata Kelola yang responsif dan transparan.
- 2) Menentukan kebijakan yang akan mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari
- 3) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
- 4) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
- 6) Menggali dan memberdayakan asset dan potensi Kalurahan untuk menciptakan peluang wisata dan usaha.
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.
- 8) Mewujudkan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun, serta rasa handarbeni untuk kemajuan Kalurahan Guwosari.
- 9) Mewujudkan Kalurahan siaga bencana dan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

F. Sejarah Goa Selarong

Goa Selarong terletak di kawasan Bukit Selarong, tepatnya di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta. Wisata alam ini berada di kaki bukit yang dikelilingi oleh suasana alami dengan pemandangan hijau dan udara sejuk, menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menelusuri sejarah.

Goa Selarong secara administratif terletak di Bukit Selarong, yang berada di Padukuhan Kauman, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Tempat ini merupakan lokasi di mana Pangeran Diponegoro pernah tinggal, bersemadi, dan mengumpulkan pengikutnya selama Perang Jawa (1825-1830).

Sejarah Goa Selarong sangat terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, tokoh utama dalam Perang Jawa (1825-1830), yang menggunakan gua ini sebagai tempat untuk bersemadi dan mengumpulkan pasukan. Pada masa tersebut, Pangeran Diponegoro menghabiskan waktu di Goa Selarong untuk melakukan tirakat dan merencanakan strategi perang. Goa ini memiliki nilai sejarah yang mendalam, karena di sinilah Pangeran Diponegoro sering kali merenung dan mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan melawan penjajahan Belanda.

Selain itu, Goa Selarong juga dikenal memiliki dua struktur gua yang bersejarah, yaitu Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong Putri. Goa Selarong Kakung, yang berada di sebelah barat, diperkirakan sudah ada sejak zaman

Hindu sebelum digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Di dalam gua ini, terdapat sejumlah pahatan dan altar yang menunjukkan bahwa gua ini pernah digunakan sebagai tempat ibadah oleh penganut Hindu pada masa lalu. Sementara itu, Goa Selarong Putri terletak sekitar 50 meter di sebelah timur Goa Selarong Kakung dan terbentuk secara alamiah dengan kondisi di dalam gua yang dipenuhi dengan runtunan batuan kapur dan akar pohon.

Keberadaan Goa Selarong sebagai situs bersejarah dan destinasi wisata alam telah menjadikannya sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain mempelajari sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam sekitar yang masih terjaga, seperti pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar bukit dan udara yang segar. Goa Selarong menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan nilai sejarah yang patut untuk dijaga dan dipelajari.

Di kawasan Bukit Goa Selarong, terdapat Struktur Cagar Budaya seperti Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong Putri, serta Benda Cagar Budaya berupa yoni dan batu monolit. Kelompok Sadar Wisata.

Goa Selarong Kakung

Gambar 2. 10 Goa Selarong Kakung



Sumber: dari peneliti sendiri

Goa Selarong Kakung terletak di sebelah barat Goa Selarong Putri. Goa Selarong Kakung dan Goa Selarong juga dikenal oleh warga dengan nama Goa Secang. Hal ini karena dulunya Bukit Selarong banyak ditumbuhi pohon secang. Gua Selarong Kakung diperkirakan merupakan gua yang telah ada pada zaman Hindu sebelum Pangeran Diponegoro menggunakannya sebagai tempat semadi. Di sinilah Pangeran Diponegoro biasa melewati malam tirakatnya sebelum pagi harinya kembali ke Tegalrejo.

Gua memiliki ukuran: panjang mulut gua 2,64 m, tinggi mulut gua 1,7 m, kedalaman gua 4,03 m, serta tinggi ruang gua 1,85 m. Pada mulut gua terdapat profil yang diperkirakan merupakan kala unfinished. Fitur tersebut tampak pada sebelah kiri mulut gua berupa dua guratan lis sepanjang 135 cm dengan jarak antar lis 15 cm pada ketinggian 140 cm.

Di sisi timur dan barat dinding gua terdapat pahatan berupa panil dan pilar, sedangkan di bagian utara gua terdapat altar yang juga merupakan hasil pahatan. Panil dan pilar pada dinding timur gua berukuran 227 cm x 107 cm. Sedangkan panil dan pilar pada dinding barat berukuran 272 cm x 103 cm.

Altar berukuran 281 cm dengan lebar 98 cm, serta tingginya 109 cm. Panil dan pilar inilah yang mengindikasikan pemanfaatan awal gua sebagai tempat beribadah penganut agama Hindu.

Di depan gua terdapat dua buah yoni yang posisinya terbalik. Bagian depan mulut gua diberi struktur baru berupa pagar tembok dan lantai dari tatanan ubin batu andesit yang dibangun pada tahun 2016.

Gambar 2. 11 Goa Selarong Putri

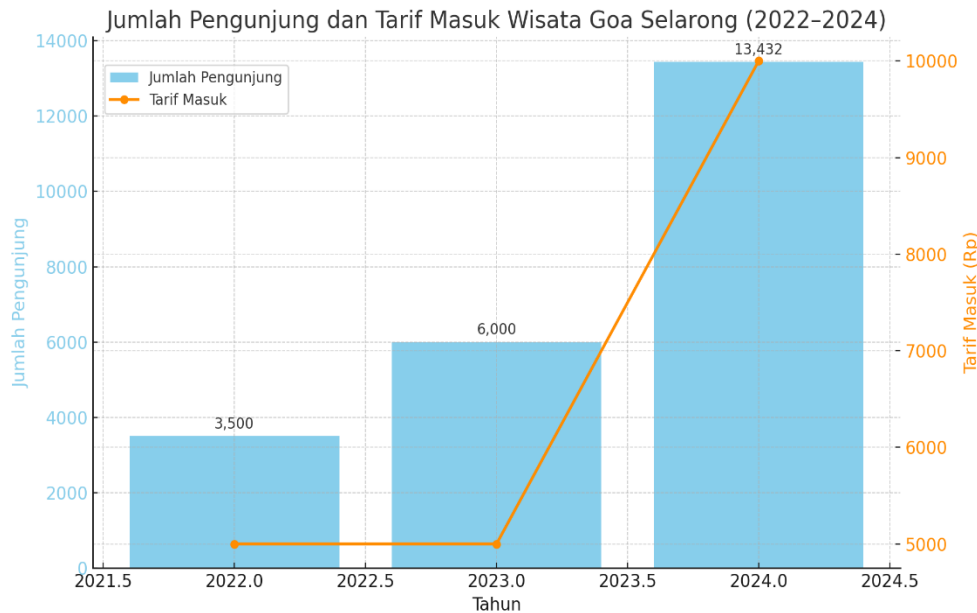


Sumber: dari peneliti sendiri

Goa Selarong Putri berjarak sekitar 50 m di sebelah timur Goa Selarong Kakung. Posisi gua memanjang dari barat ke timur. Mulut gua menghadap ke arah selatan, berukuran panjang 9,85 m dan tinggi 1,4 m. Kedalaman gua 7,54 m dan ketinggian gua bagian dalam 2,52 m. Keadaan di dalam Goa Selarong Putri berupa runtuhuan batuan kapur yang terkikis oleh air dan akar pohon yang menjalar hingga ke dalam gua. Goa Selarong Putri terbentuk secara alamiah.

Saat ini di depan mulut gua terdapat pagar tembok dan lantai dari tatanan batu andesit yang dibentuk seperti ubin. Tebing di atas mulut gua ditumbuhi pohon-pohon yang akarnya menjalar hingga ke dalam gua.

Grafik Jumlah pengunjung wisata goa selarong



Sumber: Badan Statistik Kabupaten Bantul 2024

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat adanya tren kenaikan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Goa Selarong selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung masih berada pada angka yang relatif rendah, yaitu sekitar 3.500 orang. Capaian ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa, baik dari sisi psikologis masyarakat untuk berwisata maupun dari terbatasnya penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tingkat lokal. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan belum optimalnya promosi juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya angka kunjungan pada tahun tersebut. Meski demikian, data

musiman seperti lonjakan saat libur Idulfitri menunjukkan adanya potensi pemulihan.

Memasuki tahun 2023, jumlah pengunjung meningkat menjadi sekitar 6.000 orang. Peningkatan ini mengindikasikan adanya proses adaptasi yang positif dari pihak pengelola dalam membangun kembali ekosistem pariwisata pasca-pandemi. Kegiatan seni dan budaya yang mulai diselenggarakan secara rutin, seperti lomba kreativitas lokal, terbukti mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan atraksi berbasis kearifan lokal berperan penting dalam menarik wisatawan. Meskipun tarif masuk masih ditetapkan pada harga yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 5.000 per orang, pengunjung merespons dengan antusias terhadap nilai-nilai edukatif dan hiburan yang ditawarkan.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perkembangan wisata Goa Selarong. Jumlah pengunjung melonjak tajam menjadi 13.432 orang, menandai pertumbuhan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor strategis, antara lain: peningkatan kualitas infrastruktur wisata (seperti pembangunan amfiteater, ruang terbuka hijau, dan fasilitas UMKM), promosi digital yang lebih gencar, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wisata sejarah dan budaya. Menarik untuk dicermati bahwa pada tahun yang sama, tarif masuk mengalami kenaikan menjadi Rp 10.000 per orang. Namun, kenaikan ini tidak berdampak negatif terhadap minat wisatawan; sebaliknya, justru menunjukkan bahwa wisatawan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pengalaman wisata yang lebih baik dan layak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan yang mengakar pada potensi lokal dan partisipasi komunitas. Dalam konteks Goa Selarong yang terletak di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi titik kunci dalam memastikan keberlanjutan destinasi wisata yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga nilai-nilai historis dan budaya. Goa Selarong yang memiliki nilai historis sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro telah lama menjadi simbol perlawanan dan kearifan lokal. Transformasi kawasan ini menjadi destinasi wisata tidak semata-mata menjadi urusan infrastruktur, tetapi juga memerlukan tata kelola partisipatif yang adil dan berkelanjutan.

Model *Collaborative governance* muncul sebagai pendekatan relevan dalam menjawab kebutuhan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini tidak hanya bermakna keterlibatan simbolik, tetapi juga substansial—di mana masyarakat lokal diberikan ruang, kapasitas, dan kepercayaan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan program, hingga pengelolaan ekonomi kreatif. Dalam praktiknya, kolaborasi ini sempat berjalan baik saat desa masih memegang otoritas pengelolaan. Namun, sejak diambil alih oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, tantangan muncul dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa sebagai aktor lokal.

Dalam wawancara Bersama Masduki Rahmad, S.IP, Lurah Guwosari, menyampaikan bahwa:

"Sebelum Goa Selarong dikelola oleh kabupaten, kami di kalurahan punya ruang besar untuk mendorong partisipasi masyarakat. Pokdarwis, kelompok ibu-ibu, dan pemuda sangat aktif dalam pengelolaan. Tapi setelah diambil alih oleh Dinas Pariwisata, ruang kolaborasi itu mengecil. Kami merasa lebih seperti penonton, bukan lagi penggerak. Kami menghargai langkah pemerintah kabupaten, tapi idealnya kolaborasi itu tetap berjalan dengan menyertakan suara kami secara aktif, bukan sekadar dilibatkan formalitas." (wawancara 14 Februari 2025)

Pernyataan Lurah Guwosari mencerminkan pergeseran peran desa dari subjek penggerak menjadi objek pelaksana pasif dalam tata kelola wisata. Di masa lalu, ketika kewenangan masih dipegang oleh desa, terdapat semangat kolaboratif yang kuat antara pemerintah desa dan warganya. Hal ini ditunjukkan melalui keaktifan berbagai kelompok sosial seperti Pokdarwis, karang taruna, dan kelompok perempuan dalam pengelolaan wisata. Namun, setelah pengelolaan dialihkan ke kabupaten, pola relasi kekuasaan berubah. Desa tidak lagi menjadi pengarah, melainkan sekadar pelaksana teknis yang perannya cenderung terbatas.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, yang berujung pada menurunnya partisipasi masyarakat secara substantif. Dalam perspektif *Collaborative governance*, kemitraan sejati harus mengedepankan kesetaraan posisi dan keterlibatan bermakna dalam proses. Ketika suara masyarakat lokal hanya dijadikan formalitas, maka semangat kolaboratif sejatinya telah melemah. Ini menjadi peringatan penting bahwa kolaborasi tidak cukup diwujudkan dalam

dokumen atau forum musyawarah, melainkan harus terlihat nyata dalam praktik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bersama.

Lebih lanjut, sikap kritis Lurah Guwosari juga menandakan adanya kerinduan akan relasi horizontal yang egaliter antara pemerintah desa dan kabupaten. Dalam pengelolaan wisata, relasi kekuasaan tidak boleh bersifat top-down, melainkan perlu dibangun dari bawah (bottom-up), sesuai konteks dan kebutuhan lokal. Hal ini penting agar keadilan distribusi manfaat dan tanggung jawab pengelolaan bisa tercapai. Desa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat semestinya tetap menjadi aktor strategis dalam menjaga nilai, budaya, dan kelestarian wilayah.

Dengan demikian, pernyataan Lurah Masduki menunjukkan pentingnya rekonstruksi model kerja sama yang menempatkan desa sebagai mitra strategis, bukan subordinat administratif. *Collaborative governance* hanya akan berhasil bila semua aktor merasa memiliki, terlibat aktif, dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Ke depan, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan adil antara kabupaten dan desa, agar ruang kolaboratif yang sejati dapat kembali pulih.

Dalam wawancara Bersama Nur Hidayat, SE, Carik Guwosari, menyampaikan bahwa:

"Dalam hal tata kelola anggaran dan perencanaan program, kami pernah punya pengalaman baik saat Goa Selarong dikelola desa. Dana bisa langsung dialokasikan untuk program padat karya dan kegiatan budaya yang relevan. Sekarang, sebagian besar anggaran dan perencanaan ada di kabupaten. Kalurahan kehilangan kapasitas strategis dalam pengembangan wisata, meskipun letaknya di wilayah kami. Ini membuat desa sulit merespon kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitar objek wisata." (wawancara tanggal 12 Februari 2025)

Pernyataan Carik Guwosari, Nur Hidayat, SE menyoroti perubahan signifikan dalam aspek pengelolaan keuangan dan perencanaan program pasca pengambilalihan kewenangan oleh pemerintah kabupaten. Ketika desa masih menjadi pengelola utama, distribusi anggaran dapat diarahkan secara lebih fleksibel dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan seperti padat karya dan acara budaya lokal merupakan wujud konkret dari praktik pembangunan berbasis komunitas. Namun, kondisi tersebut tidak lagi terjadi setelah sistem anggaran terpusat di tingkat kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem tata kelola kolaboratif, aspek keuangan dan pengambilan keputusan sangat menentukan derajat partisipasi suatu entitas. Kehilangan kendali terhadap anggaran berarti kehilangan alat strategis untuk merespons kebutuhan nyata di lapangan. Bagi pemerintah desa, ini merupakan kemunduran dari segi kapasitas kelembagaan dan efektivitas layanan publik. Apalagi, desa adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga harusnya menjadi ujung tombak dalam menangkap dinamika lokal.

Selain itu, penurunan kapasitas strategis ini berisiko menciptakan ketimpangan antara perencanaan dari atas (top-down) dengan realitas di bawah. Jika mekanisme perencanaan tidak lagi melibatkan suara desa secara substansial, maka program yang dijalankan berpotensi tidak tepat sasaran. *Collaborative governance* mengharuskan adanya pembagian peran dan sumber daya yang adil antar aktor. Ketika desa hanya menjadi pelaksana program yang sudah jadi, maka prinsip kolaborasi inklusif telah dilanggar.

Hal ini menjadi jelas bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata tidak cukup hanya dengan memperluas akses infrastruktur atau promosi, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan kelembagaan lokal. Tanpa itu, desa akan terus berada dalam posisi subordinat dan masyarakat tidak memiliki kendali atas masa depan wilayahnya sendiri. Maka, pembagian anggaran yang partisipatif dan transparan menjadi keharusan dalam menghidupkan kembali semangat kolaborasi yang sejati.

Dalam wawancara bersama Umarwanto sebagai Ulu-ulu Guwosari, menyampaikan bahwa:

"Kami dulu aktif menjaga kebersihan kawasan, mengelola aliran air, dan membuat edukasi lingkungan bersama warga. Sekarang, sejak tidak lagi mengelola langsung, kesadaran masyarakat mulai menurun. Kalau dulu ada masalah lingkungan, warga langsung bergerak. Sekarang, semuanya menunggu dinas. Padahal, masyarakat itu paham dan peduli. Mereka hanya butuh ruang untuk terlibat kembali secara aktif." (wawancara 24 Januari 2025)

Pernyataan Umarwanto memperlihatkan hubungan erat antara kepemilikan sosial atas ruang publik dengan keberlanjutan pengelolaan lingkungan. Ketika masyarakat diberikan ruang aktif dalam tata kelola, muncul semangat kolektif untuk menjaga kebersihan, mengelola air, hingga menyelenggarakan edukasi lingkungan secara swadaya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan wisata tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat secara langsung, bukan sekadar sebagai pelaksana teknis.

Namun, sejak pengelolaan berpindah ke tangan Dinas Pariwisata, ruang tersebut perlahan memudar. Hilangnya wewenang dan tanggung jawab di tingkat lokal mengakibatkan menurunnya rasa kepemilikan. Dalam

perspektif *Collaborative governance*, hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip distribusi tanggung jawab dan partisipasi bermakna. Ketika masyarakat kehilangan ruang aksi, maka yang tersisa hanyalah ketergantungan terhadap struktur formal, yang seringkali lambat dalam merespon masalah lingkungan sehari-hari.

Umarwanto juga menyinggung pentingnya rekognisi terhadap kapasitas masyarakat lokal. Pernyataan "padahal, masyarakat itu paham dan peduli" mengandung makna bahwa keterlibatan warga tidak selalu bergantung pada instruksi dari atas, tetapi bisa tumbuh dari kesadaran dan pengalaman kolektif. Oleh karena itu, pembangunan model kolaborasi yang fungsional harus menempatkan warga sebagai subjek perubahan, bukan objek administratif.

Dengan demikian, kunci keberhasilan tata kelola pariwisata berkelanjutan adalah menciptakan kembali saluran partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, pemeliharaan lingkungan, serta edukasi publik. Ruang-ruang kolaborasi yang sebelumnya hilang harus dibangun ulang dengan pendekatan yang lebih horizontal, inklusif, dan berbasis kepercayaan. Peran pemerintah dalam hal ini bukan sebagai pengambil alih mutlak, tetapi sebagai fasilitator partisipasi warga secara berkelanjutan.

Wawancara Bersama Karman, A.Md – Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata, Dinas Pariwisata Bantul

"Kami mengambil alih pengelolaan Goa Selarong agar bisa dikembangkan lebih profesional, termasuk dalam hal promosi dan peningkatan fasilitas. Tapi kami menyadari pentingnya kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Kendalanya ada pada koordinasi dan sinkronisasi program. Ke depan, kami sedang merancang skema pengelolaan bersama yang tetap memberi ruang

pada desa dan masyarakat, agar kolaborasi tidak hanya formal, tapi fungsional." (wawancara 23 April 2025)

Pernyataan dari pihak Dinas Pariwisata melalui Karman menunjukkan adanya kesadaran institusional atas pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan destinasi wisata. Tujuan profesionalisasi yang diusung dinas sebenarnya bisa menjadi potensi besar untuk pengembangan Goa Selarong, khususnya dalam aspek pemasaran dan infrastruktur. Namun, pernyataan ini juga menyiratkan bahwa dalam proses pengambilalihan, aspek koordinasi dan partisipasi belum berjalan optimal, yang menjadi sumber tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang kolaboratif.

Karman menyebutkan rencana perbaikan melalui skema pengelolaan bersama sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut. Hal ini positif, karena menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah terhadap perubahan dan evaluasi kebijakan. Namun, agar skema ini tidak berhenti pada level wacana, dibutuhkan mekanisme yang konkret dan terstruktur dalam menjamin keterlibatan semua pihak. *Collaborative governance* tidak dapat berhasil jika kolaborasi hanya terjadi dalam forum seremonial tanpa kejelasan peran, wewenang, dan manfaat.

Pernyataan ini juga mencerminkan pentingnya membangun sistem komunikasi dua arah yang terbuka antara pemerintah kabupaten dan aktor lokal. Ketika desa dan masyarakat tidak diberi ruang berpendapat atau dilibatkan sejak tahap perencanaan, maka akan sulit menciptakan rasa memiliki yang mendalam. Akibatnya, tujuan profesionalisasi berisiko tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan warga. Oleh karena itu, skema pengelolaan bersama yang ideal adalah yang menyatukan kapasitas

teknokratik pemerintah daerah dengan pengetahuan kontekstual masyarakat setempat.

Dengan demikian, langkah Dinas Pariwisata untuk merancang kolaborasi yang lebih fungsional patut diapresiasi, tetapi juga perlu dikawal. Keterlibatan masyarakat dan desa harus dilihat bukan sebagai penghambat, melainkan mitra sejajar yang mampu memberikan kontribusi nyata. Hanya dengan pendekatan kolaboratif yang berimbang dan saling percaya, pengelolaan Goa Selarong bisa mencapai profesionalisme tanpa kehilangan akar sosial dan kulturalnya.

Wawancara Bersama Warih Ardia, RD, A.Md sebagai Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

"Goa Selarong memiliki potensi luar biasa, terutama sebagai wisata sejarah dan religi. Kami menggandeng berbagai pihak, termasuk pihak swasta. Namun, kami akui bahwa peran masyarakat lokal harus diperkuat kembali. Harapannya, kolaborasi tidak sekadar dalam bentuk partisipasi pasif seperti tenaga kebersihan atau parkir, tapi dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan produk wisata juga." (wawancara 23 April 2025)

Pernyataan Warih Ardia menegaskan pentingnya memperluas makna partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Ia mengakui bahwa pelibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada fungsi teknis-operasional semata, seperti tenaga kebersihan atau penjaga parkir. Sebaliknya, warga lokal harus diberi ruang dalam ranah strategis, termasuk perumusan kebijakan, pengembangan produk, dan penciptaan narasi wisata. Hal ini penting agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan, tetapi menjadi mitra sejati dalam pembangunan pariwisata.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa dinas memiliki refleksi kritis terhadap praktik kolaborasi yang terjadi. Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat hanya simbolik, sehingga kontribusi mereka menjadi tidak optimal. Padahal, masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual yang tak tergantikan, terutama dalam pengelolaan nilai budaya, narasi sejarah, dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik utama Goa Selarong. Oleh karena itu, memperkuat peran warga berarti mengembalikan substansi kolaborasi yang humanistik dan kontekstual.

Keterlibatan pihak swasta seperti disebutkan Warih juga menjadi faktor penting dalam skema kolaborasi. Namun, kolaborasi multiaktor ini harus dijaga agar tidak timpang, di mana pihak swasta hanya berfokus pada keuntungan finansial, sementara masyarakat lokal menerima dampak sosial dan ekonomi yang tidak sebanding. Maka, peran pemerintah sangat penting sebagai penjaga keseimbangan dalam mengatur relasi kepentingan antara masyarakat dan swasta.

Wawancara Bersama Suradih selaku Tokoh Masyarakat sekitar Goa Selarong

"Dulu kami sering diajak rapat oleh desa untuk membahas program wisata, termasuk kegiatan budaya dan pelestarian situs. Sekarang, jarang sekali ada forum seperti itu. Kami merasa kehilangan ruang bicara. Kami tidak menolak kehadiran kabupaten, tapi kami ingin suara kami tetap dihargai. Goa Selarong bukan hanya tempat wisata, tapi bagian dari sejarah dan kehidupan kami." (wawancara 23 Januari 2025)

Pernyataan Suradih, sebagai tokoh masyarakat, merefleksikan hilangnya wadah partisipatif yang sebelumnya memberi ruang ekspresi kepada warga. Ketika forum-forum musyawarah yang melibatkan masyarakat

tidak lagi dijalankan secara konsisten, maka kanal aspirasi warga menjadi terputus. Ini bukan sekadar masalah teknis komunikasi, melainkan soal hak atas ruang politik lokal yang diabaikan. Goa Selarong tidak hanya situs fisik, tetapi juga simbol identitas dan memori kolektif bagi warga setempat.

Dalam model *collaborative governance*, masyarakat lokal bukan hanya pelaksana program, tetapi juga pemilik sah dari narasi dan nilai-nilai yang melekat pada destinasi tersebut. Ketika keterlibatan warga menjadi seremonial dan tidak substantif, maka risiko alienasi sosial menjadi tinggi. Warga merasa bahwa mereka dijauhkan dari keputusan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan nilai budaya mereka sendiri. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial terhadap pelestarian situs.

Suradi menekankan pentingnya "ruang bicara" sebagai simbol pengakuan terhadap eksistensi sosial masyarakat dalam sistem tata kelola. Tanpa ruang ini, masyarakat akan merasa termarginalkan dalam dinamika pembangunan. Maka, perlu dipulihkan kembali forum dialog yang tidak hanya formal, tetapi memiliki substansi dan daya tawar yang jelas bagi warga lokal. Desa, bersama pemerintah kabupaten, perlu membangun mekanisme sinergi yang memulihkan dan memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra sejajar dalam pengelolaan pariwisata.

Dengan demikian, pernyataan Suradi merupakan pengingat bahwa destinasi wisata tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang menghidupinya. Untuk menjamin keberlanjutan Goa Selarong, partisipasi masyarakat harus dipulihkan melalui forum deliberatif yang rutin, terbuka,

dan bermakna. *Collaborative governance* sejati adalah yang mampu mendengarkan, mengakomodasi, dan mewujudkan suara masyarakat sebagai bagian dari arsitektur kebijakan pembangunan.

Wawancara Bersama Ratih sebagai Pelaku UMKM Lokal, menyampaikan bahwa:

"Waktu desa masih mengelola, kami diajak kerja sama untuk jualan di area wisata. Sekarang, kami harus ikut sistem baru dari dinas yang lebih ketat dan kadang memberatkan. Beberapa teman bahkan tidak lagi bisa berjualan. Kami ingin sistem yang lebih adil dan tetap berpihak pada warga sekitar." (wawancara 22 Januari 2025)

Pernyataan Ratih menggarisbawahi dampak nyata dari peralihan pengelolaan wisata terhadap pelaku UMKM lokal. Ketika pengelolaan masih dipegang oleh pemerintah desa, terdapat fleksibilitas dan kedekatan relasi sosial yang memungkinkan pelaku usaha kecil berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi wisata. Namun, setelah sistem dikelola oleh dinas, regulasi menjadi lebih birokratis dan cenderung menutup ruang partisipasi bagi pelaku ekonomi kecil. Akibatnya, beberapa pedagang lokal kehilangan akses terhadap sumber penghidupan mereka.

Dalam kerangka *Collaborative governance*, partisipasi ekonomi masyarakat lokal merupakan salah satu indikator penting keberhasilan tata kelola. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berkembang melalui ekonomi kreatif, maka tercipta hubungan saling menguntungkan antara pertumbuhan destinasi dan kesejahteraan warga. Namun, jika regulasi menjadi eksklusif dan tidak adaptif terhadap kondisi pelaku UMKM, maka pembangunan pariwisata justru menciptakan ketimpangan dan eksklusi sosial di tingkat lokal.

Pengalaman Ratih menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat tidak cukup hanya dalam bentuk forum musyawarah atau pelatihan, tetapi juga harus terwujud dalam kebijakan yang berpihak pada keseharian ekonomi mereka. Sistem baru dari dinas yang terlalu ketat menjadi penghambat partisipasi warga, terlebih ketika tidak disertai mekanisme adaptasi yang mempertimbangkan keterbatasan sumber daya UMKM lokal. Maka, perlu ada harmonisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan desa dalam menyusun regulasi usaha yang inklusif.

Dengan demikian, pengembangan desa wisata harus memastikan keberpihakan terhadap pelaku ekonomi lokal sebagai bagian dari aktor kolaboratif. Penataan usaha tidak boleh dimaknai sebagai kontrol sepihak, tetapi sebagai ruang mediasi yang mempertemukan kepentingan tata kelola profesional dengan realitas ekonomi warga. Jika prinsip ini dijalankan, maka pariwisata tidak hanya menghidupkan destinasi, tetapi juga menghidupi masyarakatnya.

Wawancara Jumino selaku Anggota Pokdarwis, menyampaikan bahwa:

"Pokdarwis sempat aktif mengelola parkir, kebersihan, dan pemandu wisata. Tapi sekarang, kami seperti dibubarkan diam-diam. Tidak ada pelibatan resmi lagi. Padahal kami sudah punya pelatihan dan pengalaman. Ini membuat kami kecewa. Kami siap berkolaborasi lagi jika diberi kepercayaan." (wawancara 22 Januari 2025)

Pernyataan Jumino menyoroti aspek penting dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas, yaitu keberlanjutan peran kelembagaan lokal seperti Pokdarwis. Ketika Pokdarwis aktif, mereka tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga membangun koneksi sosial dan menjadi bagian dari

sistem belajar kolektif dalam pengelolaan wisata. Namun, ketika tidak ada lagi pelibatan resmi, kapasitas yang sudah dibangun perlahan tergerus dan hilang arah. Ini menjadi contoh nyata kegagalan dalam menjaga kontinuitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks *collaborative governance*, keberadaan dan pelibatan Pokdarwis sangat strategis karena mereka adalah entitas yang mewakili kepentingan lokal dan menjadi jembatan antara warga dengan pengelola resmi. Ketiadaan pelibatan formal terhadap kelompok ini mencerminkan lemahnya komitmen institusi dalam mempertahankan semangat kolaboratif. Ini bukan hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga secara psikologis mematahkan semangat partisipatif warga yang sudah dibina bertahun-tahun.

Jumino menegaskan bahwa mereka siap untuk kembali berkontribusi, asalkan diberi kepercayaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa modal sosial dan niat baik dari masyarakat masih sangat kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesediaan dari pihak pemerintah, khususnya dinas, untuk membuka kembali ruang kolaborasi dengan Pokdarwis sebagai mitra strategis. Pengabaian terhadap peran mereka justru menghambat efisiensi pengelolaan dan memperbesar kesenjangan antara struktur formal dan komunitas lokal.

Dengan demikian, membangun kembali kepercayaan antara Pokdarwis dan pemerintah bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Keterlibatan mereka dalam pengelolaan parkir, kebersihan, dan pelayanan wisata adalah bentuk konkret kontribusi warga yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan tata kelola wisata yang efisien, inklusif, dan

berkelanjutan. Pokdarwis bukan sekadar pelengkap, tetapi pilar penting dalam praktik kolaborasi yang humanis dan berbasis potensi lokal.

Wawancara Bersama Triyanto selaku Ketua Karang Taruna Padukuhan Kembangputihan, menyampaikan bahwa:

"Kami dulu terlibat sebagai relawan wisata, ikut promosi di media sosial, dan menghidupkan suasana. Sekarang, kami tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada informasi dari dinas. Kami ingin dilibatkan kembali, karena kami juga bagian dari Goa Selarong." (wawancara 21 Januari 2025)

Pernyataan Triyanto memperlihatkan kerinduan pemuda lokal untuk kembali mengambil peran aktif dalam pengembangan pariwisata Goa Selarong. Keterlibatan mereka sebelumnya sebagai relawan wisata dan promotor digital menandakan adanya semangat generasi muda dalam membangun destinasi wisata yang dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, hilangnya komunikasi dan minimnya informasi dari pihak pengelola telah meredam inisiatif tersebut.

Dalam perspektif *collaborative governance*, generasi muda adalah aset strategis yang tidak hanya membawa semangat, tetapi juga kompetensi digital dan inovatif. Ketika mereka tidak lagi memiliki ruang untuk berkontribusi, maka potensi besar untuk melakukan pembaruan dan promosi berbasis media sosial menjadi terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak boleh hanya melibatkan struktur formal dan pelaku lama, tetapi harus memperluas cakupan hingga ke generasi penerus yang memiliki kapasitas membangun daya saing destinasi wisata.

Ketiadaan komunikasi dari dinas kepada komunitas pemuda seperti Karang Taruna juga mengindikasikan lemahnya sistem diseminasi informasi

dan koordinasi lintas kelompok sosial. Padahal, keterlibatan Karang Taruna dalam kegiatan wisata dapat memperkuat relasi sosial antarwarga, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, dan menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan acara wisata, promosi, maupun aktivitas edukatif lainnya.

Dengan demikian, peran pemuda dalam pengembangan wisata harus dikembalikan dan diperkuat melalui program pelibatan yang nyata dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten, melalui dinas terkait, perlu menginisiasi forum komunikasi dengan organisasi pemuda dan membuka ruang kolaborasi yang terbuka, kreatif, dan fleksibel. Membangun kemitraan dengan pemuda bukan hanya investasi sosial jangka panjang, tetapi juga strategi untuk memastikan keberlanjutan destinasi wisata yang adaptif terhadap perubahan zaman.

B. Tindakan Kalaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata

Penerapan prinsip *collaborative governance* dalam konteks pengembangan Goa Selarong menunjukkan dinamika relasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mencapai kesepakatan bersama atau konsensus yang berkelanjutan. Pada tahap awal ketika pengelolaan masih berada di bawah kewenangan Kalurahan Guwosari, terdapat keselarasan peran dan semangat gotong royong yang tumbuh dari bawah (bottom-up). Semua unsur masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan.

Namun seiring berjalannya waktu, setelah pengelolaan Goa Selarong dialihkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pola kolaborasi mengalami transformasi. Perubahan ini melahirkan konsensus baru yang lebih birokratis dan terstruktur, namun meninggalkan kesan berkurangnya ruang bagi aspirasi lokal. Masyarakat yang sebelumnya aktif kini berada dalam posisi lebih pasif, dengan partisipasi yang cenderung bersifat pelengkap. Hal ini menimbulkan ketegangan antara idealisme pembangunan inklusif dan praktik administratif yang sentralistik.

Dinamika tersebut terekam dalam berbagai wawancara dengan para pemangku kepentingan. Narasi-narasi ini merepresentasikan suara dari pemerintah kalurahan, masyarakat lokal, tokoh budaya, pemuda, hingga perwakilan dari dinas terkait. Analisis berikut menyajikan refleksi dari konsensus yang dibangun, sekaligus kritik dan harapan akan bentuk kolaborasi yang lebih manusiawi, setara, dan berkelanjutan.

Dalam wawancara bersama Masduki Rahmad, S.IP Lurah Guwosari, menyampaikan bahwa:

“Awalnya, Goa Selarong ini dikelola oleh desa. Semua unsur masyarakat kami libatkan mulai dari pemuda karang taruna, kelompok seni budaya, pengrajin, sampai pelaku UMKM. Dulu, suasana kolaboratif itu terasa kuat. Kami rapat bersama, ambil keputusan bareng, dan masyarakat merasa punya peran langsung. Tapi sejak pengelolaan diambil alih oleh Dinas Pariwisata Kabupaten, ruang partisipasi kami jadi berkurang. Banyak kebijakan datang dari atas, dan kami hanya dikabari, bukan diajak merumuskan. Dampaknya, semangat masyarakat ikut menurun. Mereka merasa tidak lagi menjadi bagian utama dari pengembangan wisata di wilayahnya sendiri.” (wawancara 14 Februari 2025)

Pernyataan Lurah Masduki Rahmad menggarisbawahi perubahan pola konsensus antara pemerintah desa dan kabupaten dalam pengelolaan

wisata. Pada masa awal, pendekatan yang partisipatif menjadi landasan kuat terbentuknya identitas bersama dan rasa memiliki terhadap destinasi. Konsensus bukan hanya dihasilkan lewat pertemuan formal, tetapi juga dari dialog kolektif yang melibatkan berbagai kelompok warga. Situasi ini mencerminkan bentuk ideal dari *collaborative governance* yang berakar dari lokalitas.

Namun, setelah terjadi pergeseran kewenangan ke tingkat kabupaten, pola hubungan mengalami fragmentasi. Alih-alih membangun konsensus melalui musyawarah, kebijakan disampaikan dalam bentuk instruksi dari atas ke bawah (top-down). Ketika keputusan sudah ditentukan tanpa pelibatan dari aktor lokal, maka kolaborasi berubah menjadi formalitas. Dampaknya, partisipasi yang semula tumbuh secara organik menjadi kehilangan nyawanya karena tidak lagi dibangun atas dasar saling percaya dan penghargaan peran.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar adalah bagaimana membangun kembali konsensus yang setara antara pemerintah kabupaten dan masyarakat lokal. Penguatan kapasitas masyarakat memang penting, namun tidak boleh mengorbankan semangat kolektif yang sebelumnya telah terbangun. Proses kolaboratif seharusnya tetap membuka ruang dialog dua arah yang bermakna, bukan hanya menuntut adaptasi sepihak dari komunitas lokal terhadap kebijakan struktural yang serba terstandar.

Wawancara Nur Hidayat, S.H, Carik Guwosari menyampaikan bahwa:

“Dulu, koordinasi pengelolaan Goa Selarong dilakukan secara intensif dengan pendekatan bottom-up. Warga ikut rembug, dan perencanaan selalu melibatkan tokoh-tokoh lokal. Tapi sekarang, sejak dinas mengambil alih, keputusan banyak bersifat top-down.

Kami kadang hanya diminta menyiapkan tempat atau fasilitasi acara. Padahal, jika semangat kolaborasi tetap dijaga, potensi lokal bisa lebih dimaksimalkan. Misalnya, pelatihan pemandu wisata atau pemberdayaan UMKM bisa disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat. Sekarang, kami hanya pelaksana teknis yang perannya terbatas.” (wawancara 12 Februari 2025)

Pernyataan Carik Guwosari memperjelas bahwa konsensus yang dulunya tumbuh dari partisipasi aktif kini bergeser menjadi semu. Ketika pendekatan bottom-up digantikan oleh sistem top-down, maka relasi yang seharusnya sejajar berubah menjadi instruksional. Tokoh lokal kehilangan otoritas moral dan fungsional dalam proses perencanaan, yang seharusnya menjadi ruang tumbuhnya inisiatif lokal.

Kekosongan ini menciptakan kesenjangan antara aspirasi warga dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan potensi internal yang seharusnya menjadi tulang punggung dari daya saing pariwisata berbasis komunitas. Kolaborasi yang ideal adalah ketika pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar operator kebijakan yang mengatur segalanya dari pusat.

Melalui penguatan peran teknis semata, masyarakat lokal diperlakukan sebagai eksekutor, bukan sebagai mitra. Maka dari itu, konsensus sejati hanya bisa dicapai jika ada ruang untuk musyawarah, adaptasi nilai lokal dalam desain program, serta penghargaan terhadap pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas aktor yang bukan hanya menyatukan kebijakan, tapi juga menyatukan visi dan emosi kolektif.

Wawancara Umarwanto sebagai Ulu-ulu Kalurahan Guwosari, menyampaikan bahwa:

“Kawasan Goa Selarong itu bukan hanya objek wisata, tapi juga punya nilai ekologis. Ada sumber mata air, vegetasi lokal, dan kawasan lindung yang jadi perhatian kami. Saat masih dikelola desa, kami dilibatkan dalam proses penataan kawasan, sehingga aspek lingkungan tetap dijaga. Tapi setelah pengelolaan diambil alih, perhatian pada aspek lingkungan mulai tergeser oleh kepentingan pembangunan fisik. Kami jarang diajak rapat teknis atau survei lokasi, sehingga pengawasan jadi lemah. Padahal, salah satu kekuatan desa wisata adalah keberlanjutan lingkungan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi kerusakan akan makin besar.” (wawancara 24 Januari 2025)

Pernyataan dari Ulu-ulu Guwosari menyampaikan dimensi penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam, yaitu keberlanjutan ekologis. Dalam konteks ini, konsensus yang dibangun seharusnya tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan sebagai sumber daya utama. Ketika pengelolaan masih berada di tangan pemerintah desa, koordinasi teknis yang melibatkan warga memungkinkan terciptanya harmoni antara pembangunan dan pelestarian alam.

Namun, sejak terjadi pergeseran kewenangan ke tingkat kabupaten, fokus pembangunan menjadi lebih fisik dan infrastruktur-sentris. Proyek pembangunan seringkali tidak disertai dengan keterlibatan pihak lokal dalam tahap perencanaan teknis, termasuk mereka yang memahami lanskap ekologis setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa konsensus yang dibangun belum inklusif terhadap suara yang membawa kepentingan ekologis dan keberlanjutan jangka panjang.

Padahal, dalam konteks desa wisata, kekuatan utama bukan hanya pada jumlah kunjungan, melainkan pada keberlanjutan sumber daya dan pengalaman yang otentik. Konsensus ideal dalam pembangunan desa wisata

seperti Goa Selarong perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk mereka yang sehari-hari berhadapan langsung dengan dampak pembangunan. Tanpa kolaborasi yang berakar pada nilai lokal dan kesadaran ekologis, maka kemajuan yang dibangun dapat berujung pada kerusakan yang tak terpulihkan.

Wawancara Warih Ardia, RD, A.Md – Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, menyampaikan bahwa:

“Kami menyadari bahwa pengalihan pengelolaan dari kalurahan ke kabupaten memunculkan tantangan dalam hal partisipasi masyarakat. Namun, perlu dipahami bahwa skala pengelolaan kini lebih luas dan menysasar pasar regional hingga nasional. Maka dari itu, pendekatan kolaboratif kami sesuaikan dengan struktur kelembagaan yang ada, termasuk membentuk tim kerja bersama, menggandeng kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan menyusun program pelatihan terpadu. Kami tidak pernah menutup akses masyarakat. Justru, melalui pendekatan ini, warga lokal bisa diberdayakan secara lebih profesional. Mereka kami libatkan dalam penyediaan jasa wisata, kuliner, pemandu lokal, dan atraksi budaya. Hanya saja, sistemnya lebih formal sekarang. Kami ingin masyarakat tidak hanya aktif, tapi juga kompeten. Itulah esensi dari kolaborasi yang berkelanjutan: membangun kapasitas, bukan sekadar partisipasi simbolik.” (wawancara 23 April 2025)

Pernyataan dari perwakilan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki visi jangka panjang dalam pengelolaan Goa Selarong, dengan orientasi pada pasar pariwisata yang lebih luas dan standar profesionalisme yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, konsensus yang dibangun bersandar pada struktur kelembagaan yang lebih formal, dengan penekanan pada pelatihan, peran strategis Pokdarwis, dan pembangunan kapasitas warga lokal sebagai aktor pariwisata.

Namun, pendekatan ini juga menunjukkan adanya perbedaan paradigma dengan konsensus berbasis lokal yang pernah berkembang

sebelumnya. Ketika formalitas menjadi landasan kolaborasi, ada risiko terjadinya eksklusi terhadap kelompok-kelompok yang tidak terbiasa dengan prosedur birokratis. Pendekatan profesional tidak salah, namun akan lebih kuat jika dibarengi dengan nilai-nilai lokal dan fleksibilitas dalam implementasi program.

Kolaborasi tidak cukup sekadar menciptakan peluang, tapi juga harus disertai dengan kepekaan terhadap struktur sosial dan budaya yang sudah lebih dahulu hidup di masyarakat. Dengan menggabungkan kapasitas kelembagaan dan kearifan lokal, konsensus antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya akan berkelanjutan secara administratif, tetapi juga secara sosial dan emosional sebuah bentuk kolaborasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga memanusiakan.

Wawancara Ibu Ratih sebagai Pelaku UMKM, menyampaikan bahwa:

“Dulu waktu dikelola Kalurahan, kami bisa jualan dengan lebih leluasa. Kami ikut rapat, diajak rembug soal kebersihan, penataan lokasi, dan jadwal event. Sekarang beda. Setelah diambil alih oleh dinas, kami harus ikut aturan yang lebih ketat. Banyak pedagang lokal yang kesulitan karena tidak semua mendapat tempat. Kadang kami merasa seperti ‘orang luar’ di wilayah sendiri. Kalau dulu rasanya kami ikut membangun, sekarang hanya menumpang.”
(wawancara 22 Januari 2025)

Pengalaman Ibu Ratih menyoroti dimensi ekonomi dari konsensus antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam hal pelibatan pelaku UMKM lokal. Ketika pengelolaan berada di bawah desa, pelaku usaha kecil merasa menjadi bagian utuh dari ekosistem pariwisata. Konsensus dibangun secara informal, fleksibel, dan berdasarkan kedekatan emosional yang memberi rasa memiliki terhadap ruang wisata yang mereka dukung sejak awal.

Namun, pergeseran ke aturan yang lebih ketat dan formal menyebabkan keterbatasan akses bagi pelaku UMKM. Mereka tidak hanya kehilangan ruang secara fisik, tetapi juga ruang sosial dan psikologis sebagai bagian dari pembangunan. Dalam konteks ini, konsensus yang terlalu terstruktur justru bisa menciptakan eksklusi, bahkan terhadap warga yang sebelumnya berperan aktif dalam keberhasilan destinasi.

Kolaborasi yang baik dalam pengembangan wisata seharusnya memberikan ruang adaptif bagi pelaku lokal. Bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari cara komunikasi dan pengambilan keputusan. Jika pelaku UMKM lokal merasa menjadi "penumpang" di wilayah sendiri, maka ada sesuatu yang keliru dalam praktik kolaborasi yang tengah dijalankan. Konsensus sejati adalah ketika semua pihak merasa dihargai, didengar, dan diikutsertakan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara batiniah.

Wawancara Triyanto sebagai Ketua Karang Taruna Padukuhan Kembangputihan, menyampaikan bahwa:

“Dulu kami rutin mengadakan kegiatan wisata kreatif seperti pertunjukan seni, guiding sejarah, dan jelajah alam. Waktu kalurahan masih mengelola, ide dari kami bisa langsung dijalankan. Sekarang lebih rumit. Kalau mau bikin acara harus izin ke kabupaten, prosesnya panjang dan sering kali tidak ada tindak lanjut. Akibatnya, semangat teman-teman muda mulai turun. Mereka merasa tidak diberi ruang lagi untuk berperan.” (wawancara 21 Januari 2025)

Pernyataan Triyanto mengungkapkan bahwa konsensus yang melibatkan unsur pemuda dalam pengelolaan wisata mengalami kemunduran setelah perubahan struktur kelembagaan. Pada masa desa masih berperan langsung dalam pengelolaan, relasi antara pemerintah dan pemuda dibangun atas dasar kepercayaan, fleksibilitas, dan respon yang cepat terhadap inisiatif

kreatif. Dalam konteks ini, konsensus terbentuk dari ruang-ruang interaksi yang tidak kaku, memungkinkan ide-ide lokal berkembang secara dinamis.

Namun, perubahan struktur menjadi lebih birokratis justru menyulitkan pemuda untuk berkontribusi. Prosedur perizinan yang panjang dan lambannya tindak lanjut membuat banyak inisiatif kreatif kehilangan momentumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang terlalu administratif bisa menghambat keterlibatan aktor-aktor muda yang memiliki energi dan imajinasi sebagai kekuatan sosial dalam menghidupkan destinasi wisata.

Rasa kehilangan ruang berperan yang dialami pemuda bukan semata karena perubahan regulasi, tetapi juga karena tidak adanya saluran konsensus yang memungkinkan ide mereka dihargai dan difasilitasi. Oleh karena itu, pembangunan desa wisata seperti Goa Selarong membutuhkan konsensus baru yang memberi ruang bagi kreativitas generasi muda, bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi pengambilan keputusan dan penghargaan terhadap inisiatif akar rumput.

Wawancara Tuci selaku Tokoh Budaya Kalurahan Guwosari, menyampaikan bahwa:

“Goa Selarong punya nilai sejarah dan spiritual yang tinggi, bukan sekadar tempat wisata. Dulu kami dilibatkan untuk menjaga keseimbangan antara pengunjung dan nilai-nilai budaya lokal. Sekarang, pembangunan fisik dan promosi wisata lebih menonjol, sementara aspek budaya mulai tergeser. Kolaborasi yang dulu terasa dekat, kini lebih bersifat formal dan sesekali saja. Padahal, masyarakat lokal bukan hanya pelengkap, tapi bagian dari identitas tempat ini.” (wawancara 4 Februari 2025)

Pernyataan Tuci, seorang tokoh budaya, menyentuh dimensi paling mendalam dari pengembangan pariwisata, yaitu pelestarian nilai dan identitas

lokal. Konsensus yang dibangun pada masa awal pengelolaan berbasis desa mencerminkan pengakuan penuh terhadap masyarakat adat dan nilai-nilai spiritual yang hidup di sekitar Goa Selarong. Kolaborasi kala itu tidak hanya soal program kerja, melainkan sebuah upaya merawat harmoni antara manusia, alam, dan budaya.

Namun, setelah orientasi pembangunan bergeser ke arah modernisasi dan promosi massal, ruang budaya mulai tergeser. Ketika pembangunan fisik lebih diprioritaskan dan masyarakat lokal hanya dilibatkan sesekali, maka konsensus menjadi dangkal dan cenderung simbolik. Kehilangan dimensi budaya dalam proses kolaborasi berarti kehilangan fondasi makna dari wisata itu sendiri. Sebab, wisata bukan hanya soal tempat, tapi juga soal cerita, nilai, dan rasa.

Dalam kerangka *collaborative governance* yang humanistik, tokoh-tokoh budaya lokal seharusnya diberi ruang permanen dalam proses pengambilan keputusan. Mereka bukan hanya penjaga tradisi, tetapi juga jembatan yang menyatukan generasi muda, pemerintah, dan pengunjung dalam satu kesadaran bersama: bahwa wisata yang lestari hanya bisa dibangun jika nilai-nilai budaya tetap menjadi pusat orientasi pembangunan. Maka dari itu, konsensus perlu direposisi: tidak hanya berbasis efisiensi pembangunan, tapi juga keberlanjutan identitas.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa

Wisata

Pengembangan desa wisata tidak lepas dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Di Kalurahan Guwosari, pengembangan objek wisata Goa Selarong menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat menjadi kekuatan utama. Faktor pendukung utama berasal dari kekayaan potensi lokal, seperti keindahan alam, nilai sejarah dan budaya, serta kearifan lokal yang khas. Goa Selarong, sebagai situs bersejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, memiliki daya tarik spiritual dan historis yang kuat. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi modal sosial yang penting dalam membangun desa wisata yang berkelanjutan.

Pengalihan pengelolaan Desa Wisata Goa Selarong dari Kalurahan Guwosari ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul membawa perubahan signifikan dalam dinamika pengembangan kawasan tersebut. Di satu sisi, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat upaya peningkatan kualitas destinasi. Dengan dikelola langsung oleh dinas, pengembangan Goa Selarong mendapatkan akses lebih besar terhadap sumber daya, baik dari segi anggaran, jaringan promosi, maupun infrastruktur.

Namun demikian, terdapat pula faktor penghambat yang perlu dicermati, terutama menyangkut keterlibatan masyarakat lokal. Sejak pengelolaan beralih ke dinas, partisipasi warga Kalurahan Guwosari mengalami penurunan karena peran mereka menjadi lebih terbatas dan bersifat formal. Kolaborasi yang sebelumnya terjalin secara langsung, cair, dan berbasis kedekatan sosial kini bergeser menjadi hubungan kelembagaan

yang kaku dan *top-down*. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebijakan pengelolaan dan dinamika sosial di tingkat akar rumput. Selain itu, proses pengambilan keputusan cenderung terpusat di tingkat kabupaten, yang menyebabkan aspirasi lokal kurang tersalurkan secara maksimal. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka potensi sosial dan budaya masyarakat setempat yang semula menjadi kekuatan utama pengembangan Goa Selarong dapat terpinggirkan.

Dengan demikian, keberhasilan pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata sangat bergantung pada kemauan untuk menjaga keseimbangan antara profesionalisme manajemen dan pemberdayaan masyarakat. Dukungan dari lembaga formal harus dibarengi dengan ruang partisipasi yang nyata dan berkelanjutan bagi warga lokal, agar nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa dari destinasi wisata ini. Pernyataan diatas dibuktikan dengan hasil wawancara berikut.

Dari pihak Pemerintah Kalurahan Guwosari Lurah, Carik dan Ulu-ulu menyampaikan pandangan terkait factor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Masduki Rahmad, S.I.P selaku Lurah Guwosari menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Faktor pendukung pengembangan Desa Wisata Goa Selarong tentu banyak, terutama *dari* sisi potensi alam, nilai sejarah, dan antusiasme masyarakat. Lokasinya strategis, akses jalan sudah bagus, dan daya tarik sejarahnya kuat karena ini tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Masyarakat kami dulu juga sangat aktif ketika desa masih mengelola. Mereka punya semangat gotong royong tinggi. Tapi sekarang, tantangan utamanya adalah koordinasi lintas kelembagaan. Setelah pengelolaan diambil alih oleh kabupaten,

komunikasi antara desa dan dinas tidak seintensif dulu. Kadang ada kebijakan dari dinas yang tidak dikonsultasikan terlebih dahulu ke kalurahan. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan di lapangan. Masyarakat pun mulai kehilangan rasa memiliki, karena merasa tidak dilibatkan lagi dalam pengambilan keputusan.” (wawancara 14 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Goa Selarong memiliki banyak faktor pendukung, seperti potensi alam, nilai sejarah yang kuat, lokasi strategis, serta antusiasme dan semangat gotong royong masyarakat. Namun, setelah pengelolaan diambil alih oleh pemerintah kabupaten, muncul tantangan dalam hal koordinasi lintas kelembagaan. Minimnya komunikasi dan konsultasi antara dinas dan pihak desa menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan di lapangan, yang pada akhirnya melemahkan partisipasi masyarakat dan menurunkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata yang sebelumnya mereka kelola secara aktif.

Sementara itu, Nur Hidayat, SH sebagai Cari Guwosari juga menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“Kalau kita bicara faktor pendukung, saya lihat SDM lokal sebenarnya sangat potensial. Kami punya pemuda kreatif, kelompok seni budaya, hingga pengelola homestay. Infrastruktur juga cukup memadai. Dulu saat masih dikelola desa, semua potensi ini bergerak bareng. Tapi setelah dialihkan, posisi kami sebagai desa jadi seperti ‘penonton’. Ini yang jadi penghambat. Hambatan lain adalah soal birokrasi. Ketika desa mengelola, keputusan bisa cepat diambil dan langsung diterapkan. Sekarang, kalau mau buat kegiatan harus melalui banyak tahap di tingkat kabupaten. Ini membuat masyarakat merasa jauh dari proses. Jadi meskipun ada potensi besar, kalau sistem tidak fleksibel dan tidak membuka ruang partisipasi, maka potensi itu tidak bisa maksimal.” (wawancara 12 Februari 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Goa Selarong sebenarnya memiliki potensi sumber daya manusia

yang sangat baik, termasuk pemuda kreatif, kelompok seni budaya, dan pengelola homestay, serta didukung oleh infrastruktur yang memadai. Namun, setelah pengelolaan dialihkan ke tingkat kabupaten, peran desa menjadi terbatas dan lebih seperti penonton, sementara proses birokrasi yang panjang menghambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan secara cepat. Kondisi ini membuat masyarakat merasa terpinggirkan dan jauh dari proses pengelolaan, sehingga meskipun potensi besar ada, tanpa sistem yang fleksibel dan ruang partisipasi yang terbuka, potensi tersebut sulit untuk dimaksimalkan.

Umarwanto selaku Ulu-ulu Guwosari Juga memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Dari sisi lingkungan, kawasan Goa Selarong punya potensi air, vegetasi, dan ruang hijau yang kuat mendukung wisata alam. Itu faktor pendukung penting. Tapi pengelolaan lingkungan harus dikawal bersama. Saat dulu dikelola desa, kami bisa langsung memberi masukan kalau ada pembangunan yang melanggar zona hijau. Sekarang, kami kurang dilibatkan dalam perencanaan teknis. Hambatan utamanya adalah kurangnya keterlibatan kami dalam forum-forum teknis. Dulu, pembangunan fisik atau penataan area selalu dikonsultasikan dengan desa. Sekarang lebih banyak diputuskan dari kabupaten. Kadang, kami baru tahu setelah kegiatan berjalan. Ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dengan karakter lingkungan lokal.” (wawancara 24 Januari 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawasan Goa Selarong memiliki potensi lingkungan yang kuat dengan sumber air, vegetasi, dan ruang hijau yang mendukung pengembangan wisata alam. Namun, pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan. Saat pengelolaan masih berada di tangan desa, masukan masyarakat dapat langsung diberikan untuk mencegah pelanggaran terhadap zona hijau. Setelah

pengelolaan dialihkan ke tingkat kabupaten, keterlibatan desa dalam forum teknis menurun, sehingga banyak keputusan diambil tanpa konsultasi yang memadai, berisiko menimbulkan pembangunan yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan lokal.

Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga berpendapat terkait Faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Karman, A.Md sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata mengatakan sebagai berikut:

“Kalau kita bicara soal faktor pendukung, Goa Selarong ini punya kekuatan yang sangat lengkap. Sejarah yang kuat sebagai tempat persembunyian Pangeran Diponegoro, lokasi yang strategis, dan daya tarik alam yang masih asri. Selain itu, infrastruktur juga sudah cukup berkembang akses jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum mulai ditata lebih profesional sejak pengelolaan berada di tangan kabupaten. Itu semua mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Namun, kami tidak menutup mata bahwa proses peralihan pengelolaan ini membawa tantangan tersendiri. Salah satu hambatannya adalah munculnya jarak emosional antara masyarakat dan pengelolaan wisata. Dulu mereka terlibat langsung, sekarang perannya lebih ke mitra teknis. Kami menyadari ini bisa berdampak pada partisipasi. (wawancara tanggal 23 April 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Goa Selarong memiliki kekuatan lengkap sebagai destinasi wisata dengan nilai sejarah yang kuat, lokasi strategis, dan keindahan alam yang masih terjaga, serta dukungan infrastruktur yang semakin profesional sejak pengelolaan dialihkan ke kabupaten, yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Namun, peralihan pengelolaan ini juga menimbulkan tantangan, terutama berupa jarak emosional antara masyarakat lokal dan proses pengelolaan, di mana masyarakat kini lebih berperan sebagai mitra teknis daripada pelaku

utama, sehingga berpotensi menurunkan partisipasi aktif mereka dalam pengembangan wisata.

Sementara itu, Warih Ardia. RD., A.Md bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata juga berpendapat sebagai berikut:

“Faktor pendukung lain yang penting adalah keberadaan Pokdarwis dan kelompok pemuda desa yang sebenarnya sangat aktif. Mereka punya pengalaman mengelola dan sudah punya jejaring. Kami dari dinas melihat itu sebagai aset yang harus dirangkul, bukan digantikan. Secara kelembagaan, juga ada kerangka hukum yang lebih kuat di tingkat kabupaten, sehingga pengelolaan bisa lebih stabil dan terencana. Tapi ya memang, hambatannya ada pada proses transisi ini. Ketika kabupaten mengambil alih, banyak kebijakan yang belum sepenuhnya disosialisasikan ke masyarakat. Itu menimbulkan kesalahpahaman. Sebagian merasa diambil alih, bukan diajak kerja sama. Ini menjadi evaluasi kami. Kami sedang merancang skema kolaborasi ulang yang lebih terbuka, supaya ke depan desa tetap punya peran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata.” (wawancara tanggal 23 April 2025)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pokdarwis dan kelompok pemuda desa yang aktif dan berjejaring menjadi faktor pendukung penting dalam pengembangan Goa Selarong sebagai desa wisata. Dinas pariwisata melihat potensi ini sebagai aset yang seharusnya dirangkul dalam kerangka pengelolaan yang lebih stabil dan terencana di tingkat kabupaten. Namun, proses transisi pengelolaan menimbulkan tantangan tersendiri, terutama karena kurangnya sosialisasi kebijakan yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman dan perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat. Sebagai respons, dinas tengah merancang ulang skema kolaborasi yang lebih terbuka agar peran desa tetap terjaga, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wisata secara partisipatif.

Sementara itu dari pihak masyarakat juga menyampaikan pandangan pandangan terkait faktor pen dukung dan penghambat sebagai berikut:

Sumiati sebagai pelaku UMKM menyampaikan pandangan sebagai berikut:

“Kalau bicara soal pendukung, banyak sekali. Goa Selarong itu sudah terkenal, apalagi nilai sejarahnya sangat tinggi. Wisatawan datang terus, apalagi kalau akhir pekan. Itu membantu kami yang berjualan. Tapi sekarang aturannya makin ketat. Dulu kami bisa jualan bebas dengan kesepakatan desa. Sekarang banyak yang dibatasi. Tempat jualan diatur ulang tanpa banyak diskusi. Itu bikin kami merasa tidak nyaman.” (wawancara tanggal 30 Januari 2025)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Goa Selarong memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata, terutama karena daya tarik sejarahnya yang kuat dan arus kunjungan yang stabil, pengelolaan yang semakin formal dan ketat justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pelaku usaha lokal. Aturan baru yang diterapkan setelah pengelolaan diambil alih dinas, seperti penataan ulang lokasi usaha tanpa dialog yang memadai, dirasakan mengurangi ruang partisipasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wisata tidak hanya bergantung pada jumlah wisatawan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dan diberi ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Triyanto sebagai ketua karantaruna Padukuhan Kembangputihan menyampaikan pandangan sebagai berikut

“Pendukung utama dari pengembangan desa wisata ini sebenarnya adalah masyarakatnya sendiri. Kami punya semangat, punya ide-ide kreatif, dan sudah pengalaman membuat paket wisata lokal. Tapi sekarang, ketika dinas yang mengelola, peran kami jadi minim. Kami hanya dilibatkan kalau ada acara besar. Padahal kalau kami dilibatkan sejak awal, kegiatan bisa lebih berakar di masyarakat.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama dalam pengembangan desa wisata sebenarnya terletak pada masyarakat lokal yang memiliki semangat, kreativitas, dan pengalaman dalam mengelola potensi wisata secara mandiri. Namun, sejak pengelolaan beralih ke dinas, peran masyarakat menjadi terbatas dan cenderung hanya dimanfaatkan saat kegiatan berskala besar. Minimnya pelibatan sejak tahap perencanaan membuat program yang dijalankan terasa kurang membumi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif dalam pengembangan desa wisata harus dimulai sejak awal proses, agar kegiatan yang dilakukan benar-benar berakar pada kekuatan dan identitas lokal

Sementara itu, Tuci sebagai Tokoh Budaya juga menyampaikan pandangan sebagai berikut:

“Goa Selarong itu bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga situs budaya dan spiritual. Dulu, dalam setiap kegiatan wisata, nilai-nilai budaya lokal masih dijaga. Tapi sekarang, dengan pengelolaan dari dinas, fokusnya lebih ke pembangunan fisik dan promosi. Faktor pendukung seperti kekayaan budaya dan tradisi malah seperti dilupakan. Hambatan paling besar adalah ketika budaya lokal tidak lagi diberi tempat yang semestinya.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Goa Selarong memiliki nilai lebih dari sekadar destinasi rekreasi, karena juga merupakan situs budaya dan spiritual yang sarat makna bagi masyarakat setempat. Dahulu, pengembangan wisata masih selaras dengan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, namun sejak pengelolaan beralih ke dinas, orientasi lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan promosi semata. Hal ini menyebabkan faktor pendukung utama seperti kekayaan tradisi dan kearifan

lokal justru terpinggirkan. Hambatan terbesar dalam pengembangan wisata Goa Selarong saat ini adalah ketika aspek budaya tidak lagi menjadi bagian inti dari pengelolaan, sehingga mengancam identitas dan keberlanjutan nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi ruh dari destinasi tersebut.

Dari keseluruhan wawancara di atas, pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari didukung oleh berbagai faktor penting seperti potensi alam dan sejarah yang kuat, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia lokal yang aktif dan kreatif, serta tradisi gotong royong yang masih melekat dalam masyarakat. Namun, setelah pengelolaan dialihkan ke Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, muncul hambatan berupa melemahnya komunikasi dan koordinasi antara desa dan dinas, birokrasi yang semakin panjang dan top-down, serta berkurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, sehingga partisipasi lokal menurun dan risiko kerusakan lingkungan meningkat. Kedua pihak, baik pemerintah desa maupun dinas, sepakat bahwa pengembangan Goa Selarong memerlukan tata kelola yang lebih kolaboratif dan partisipatif, dengan desa dan masyarakat sebagai pusat pengambilan keputusan dan pengelolaan.

Dukungan lain datang dari masyarakat sekitar yang menilai potensi sejarah, budaya, dan kondisi alam yang asri menjadi modal utama pengembangan desa wisata ini, didukung juga oleh kapasitas lokal dalam UMKM, pemandu wisata, dan homestay, serta peningkatan promosi dan fasilitas oleh dinas. Namun, mereka mengeluhkan menurunnya peran serta dalam perencanaan dan pengambilan keputusan teknis, komunikasi yang kurang dua arah, serta fokus pembangunan yang terlalu berat pada aspek fisik

dan komersial sehingga mengabaikan nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Masyarakat berharap pengelolaan oleh dinas dapat membuka kembali ruang kolaboratif yang sejati, menjadikan mereka bukan sekadar objek, tapi subjek aktif dalam pembangunan wisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan prinsip Collaborative Governance dalam pengembangan Desa Wisata Goa Selarong menunjukkan dinamika yang kompleks seiring pergeseran kewenangan dari pemerintah desa ke tingkat kabupaten. Pada awalnya, saat pengelolaan berada di tangan Kalurahan Guwosari, kolaborasi berjalan secara inklusif dan partisipatif. Masyarakat, melalui kelompok sadar wisata, tokoh adat, dan pemuda, berperan aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan semangat kolektif dalam memajukan destinasi wisata.

Namun, setelah pengelolaan dialihkan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, kolaborasi menjadi lebih birokratis dan terkesan top-down. Masyarakat lokal merasa ruang partisipasinya menyempit, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program wisata. Perubahan ini berdampak pada menurunnya inisiatif warga, berkurangnya solidaritas lokal, dan lemahnya keterlibatan komunitas dalam pengelolaan sehari-hari.

Walau demikian, potensi Goa Selarong sebagai destinasi unggulan tetap besar baik dari sisi sejarah, nilai religi, kekayaan budaya, hingga sumber daya manusia lokal. Kelemahan utamanya terletak pada tidak maksimalnya komunikasi antar aktor, kurangnya trust-building, serta absennya ruang konsensus yang setara antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pengelolaan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kesetaraan, partisipasi

sejati, dan keberlanjutan sosial-lingkungan sebagaimana spirit Collaborative Governance.

B. Saran

1. Rekonstruksi Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator, Bukan Dominator

Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya Dinas Pariwisata, perlu mengambil peran sebagai fasilitator kolaborasi, bukan pengendali utama. Ruang diskusi lintas sektor dan forum koordinasi reguler antara masyarakat, pemerintah desa, swasta, dan pemangku adat perlu diaktifkan kembali. Pendekatan partisipatif ini penting agar masyarakat merasa diakui dan berdaya dalam proses pengembangan wisata.

2. Penguatan Kapasitas Lokal dan Kelembagaan Desa Wisata

Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pelaku wisata lokal, termasuk Pokdarwis, UMKM, dan generasi muda, untuk mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan berbasis masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kolaborasi jangka panjang.

3. Perluasan Model Collaborative Governance yang Inklusif dan Kontekstual

Penerapan model kolaboratif perlu disesuaikan dengan konteks sosial-budaya lokal. Pelibatan tokoh masyarakat, budayawan, dan komunitas adat sebagai aktor strategis harus diperkuat agar pengelolaan wisata tidak kehilangan akar kulturalnya. Forum musyawarah desa (musdes) dapat

menjadi ruang formal untuk menyusun agenda wisata yang disepakati bersama.

4. Pemetaan dan Evaluasi Kembali Peran Setiap Stakeholder

Perlu dilakukan pemetaan ulang aktor dan perannya dalam ekosistem pariwisata Goa Selarong. Evaluasi periodik terhadap efektivitas kolaborasi harus dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas alur informasi, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses kolaboratif.

5. Pengembangan Sistem Monitoring dan Feedback Berbasis Komunitas

Untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan, disarankan dibentuk sistem monitoring berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan warga turut memantau perkembangan wisata dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dan pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Didiek Dwiyanto, A. S. (2022). PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF *COLLABORATIVE GOVERNANCE*. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 1–11.
- Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, A. (2019). *Collaborative governance* dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(2), 112–127.
- Erica Indah Maulia, B. S. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN: ANALISIS DAMPAK DIGITALISASI DESA WISATA. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(11), 404–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v3i11.2124>
- Hana Imtiyaza, Retno Sunu Astuti, K. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KALIWLINGI DI KABUPATEN BREBES. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47321>
- Hanny Rizky Wasiat, S., & Valiant Salomo, R. (2024). *Collaborative governance* in Accelerating Stunting Reduction through Corporate Social Responsibility. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1122–1130. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3948>
- Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, I Putu Dharmanu Yudartha, I. D. A. P. W. (2024). *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Socio Politik*, 1(23–36). <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Kinanggi, A. R. (2024). *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Edelweis Wonokitri Kabupaten Pasuruan. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/musytari.v3i11.2124>
- Moreta, A., & Harirah MS, Z. (2023). *Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Nagari Tuo Pariangan pada Tahun 2021-2022. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(3), 106–112. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.180>
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriliyani. (2024). *Collaborative governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business and Investment Review*, 2(1), 45–57. <https://doi.org/10.61292/birev.92>
- Nurdiansyah Dino Alfian, I. W. (2024). *Collaborative governance* Pengembangan Pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and*

Humanities, 1(3), 1–14. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.121>

Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo). *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190–199. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i2.2605>

Sumber Lain

Peraturan Daerah (Perda) Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Peraturan Bupati (Perbub) Bantul Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Tingkat Pendidikan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Proses *Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata

1. Bagaimana pemerintah desa Guwosari menginisiasi dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Goa Selarong?
2. Sejauh mana keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Goa Selarong?
3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam proses kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta?
4. Bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengembangan desa wisata di Goa Selarong?
5. Sejauh mana masyarakat desa merasa diberdayakan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata?
6. Apa bentuk partisipasi masyarakat yang paling efektif dalam proses pengembangan desa wisata Goa Selarong?

b. Dampak *Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa

Wisata

1. Apa dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal setelah diterapkannya *Collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata?
2. Bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap perekonomian lokal dan kesempatan kerja di Goa Selarong?
3. Apakah ada perubahan signifikan dalam kualitas hidup masyarakat setelah kolaborasi ini diterapkan?
4. Bagaimana kolaborasi ini memengaruhi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di desa wisata Goa Selarong?


c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa

Wisata Goa Selarong

1. Apa faktor pendukung utama yang mempercepat pengembangan desa wisata melalui *Collaborative governance*?
2. Bagaimana dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta berperan dalam pengembangan desa wisata Goa Selarong?
3. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam memfasilitasi kolaborasi pengembangan desa wisata?
4. Apa hambatan yang dihadapi masyarakat terkait keterbatasan sumber daya atau keterampilan dalam pengelolaan desa wisata?
5. Apakah ada perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait arah pengembangan desa wisata, dan bagaimana cara mengatasinya?

LAMPIRAN

SURAT PERMOHONAN IZI PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 15/IU/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.


Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

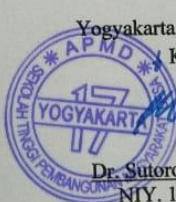
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Elton John Nembafu
No Mhs : 18520115
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Colaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Januari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



SURAT TUGAS



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

- PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
- PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

- PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
- PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 15/I/U/2025
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Di tempat.


Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

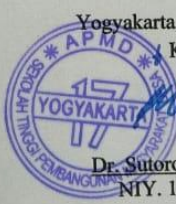
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	: Elton John Nembafu
No Mhs	: 18520115
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Colaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Tempat	: Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dosen Pembimbing	: Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Januari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190



SURAT PENUNJUK DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 132/PEM/J/X/2024

Hal : Pemunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Elton Jhon Nembafu
No. Mahasiswa	: 18520115
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024


Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

SURAT TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
KAPANEWON PAJANGAN
KALURAHAN GUWOSARI
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦒꦸꦮꦺꦴꦱꦂꦶ


Jl. Guwosari Raya Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul,
Telp/WA 0274 6461041
Kode Pos 55751 Website : guwosari.desa.id e-mail desa.guwosari@bantulkab.go.id


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 400.14.5.4 / 057

Pemerintah Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa:

Nama	: Elton John Nembafu
NIM	: 18520115
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
No. HP	: 0812 2530 7620
Judul Skripsi	: <i>Colaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Goa Selarong di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Kalurahan Guwosari untuk memenuhi tugas skripsi
terhitung tanggal 15 Januari – 14 Februari 2025.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Guwosari, 14 Februari 2025
Lurah Guwosari
Carik

NUR HIDAYAT, SE



DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Foto Bersama Masduki Rahamad, S.IP (Lurah Guwosari)



Foto Bersama Nurhidayat S.E (Ulu-ulu Guwosari)



Foto Bersama Umarwanto (Ulu-ulu Guwosari)



Foto Bersama Karman, A.Md (sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata)



Foto Bersama Warih Ardia, RD, A.Md (bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata)



Foto Bersama Ibu Sumiati (Pelaku UMKM)



Foto Bersama Ibu Ratih (Pelaku UMKM)



Foto Bersama Bapak Jumuni (Anggota Pokdarwis)



Foto Bersama Bapak Tuci (Tokoh Budaya)



Foto Bersama Suradin (Tokoh Masyarakat)



Foto Bersama Bapak Triyanto (Ketua Karangtaruna Padukuhan Kembangputihan)



Foto Objek Wisata Spiritual Goa Selarong



Foto Objek Wisata Spritual Goa Selarong



Foto Objek dan Loret Retribusi Wisata Spritual Goa Selarong



Pendopo bagian bawah sekitar Goa Selarong



Pendopo bagian atas sekitar Goa Selarong



Mushola sekitar Goa Selarong



Parkiran umum Goa Selarong